

LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

Model Inklusi Keuangan
UMKM Kerajinan Sulaman di Perdesaan

Dummy

LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

Model Inklusi Keuangan
UMKM Kerajinan Sulaman di Perdesaan

Dr. Rosyeni Rasyid, S.E., M.E.
Erni Masdupi, S.E., M.Si., Ph.D.
Muthia Roza Linda, S.E., M.M.

Dummy



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Rosyeni Rasyid, dkk.

Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan: Model Inklusi Keuangan UMKM
Kerajinan Sulaman di Perdesaan/Rosyeni Rasyid, dkk.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.

xii, 86 hlm., 23 cm.

Bibliografi: Hlm. 77

ISBN -

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022. RAJ

Dr. Rosyeni Rasyid, S.E., M.E.

Erni Masdupi, S.E., M.Si., Ph.D.

Muthia Roza Linda, S.E., M.M.

LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

Model Inklusi Keuangan UMKM Kerajinan Sulaman di Perdesaan

Cetakan ke-1, Desember 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Risty Mirsawati

Setter : Khoirul Umam

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpojan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

Alhamdulillah, atas segala curahan hidayah dan maunah-Nya, kami tim peneliti hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) Universitas Negeri Padang telah dapat menyelesaikan tahapan penelitian. Salah satu luaran dari hibah penelitian adalah penulisan buku *Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan: Model Inklusi Keuangan UMKM Kerajinan Sulaman di Perdesaan*. Luaran ini dapat disusun seiring dengan tahapan proses penelitian yang telah selesai. Sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan satu luaran yang telah dijanjikan sesuai dengan kontrak penelitian No. 430/UN35/KP/2019.

Penelitian tentang literasi dan inklusi keuangan berupa “Model Inklusi Keuangan bagi UMKM Berbasis Perdesaan di Sumatra Barat”. Penelitian ini dilakukan pada UMKM kerajinan sulaman di perdesaan. Untuk menentukan model inklusi keuangan terlebih dulu dilakukan penelitian tentang tingkat literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan, selanjutnya melakukan analisis SWOT dan hasil wawancara dan FGD, terakhir baru dirancang model inklusi keuangan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses bagi UMKM. Model inklusi keuangan yang dapat dikembangkan bagi UMKM kerajinan sulaman di perdesaan terdiri dari dua tahap. *Tahap pertama*, adalah membangun kepercayaan dan keyakinan dalam mengakses lembaga keuangan. *Tahap selanjutnya*, adalah membangun kepastian dan keberlanjutan dalam

mengakses lembaga keuangan. Tahap ini dapat dikembangkan dengan menggunakan konsep *Quadruple Helix*. Konsep ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dinas Perindagkop, pengelola pasar, dan komunitas masyarakat atau forum UMKM kerajinan dalam penyediaan dana, infrastruktur, dan penyediaan data. Jadi harus ada koordinasi dari lima komponen ini sehingga tercipta inovasi model dalam penerapan inklusi keuangan bagi UMKM kerajinan di perdesaan.

Pada kesempatan ini tim peneliti hibah penelitian terapan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang (LP2M UNP) sehingga buku ini dapat diselesaikan. Penelitian ini membantu mendukung Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Negeri Padang tahun 2016–2020, di bidang sumber daya, ekonomi dan bisnis, dan juga sejalan dengan kebijakan strategis pemerintah tahun 2020 yang merumuskan perlunya ekosistem keuangan yang berdaya saing. Dengan model inklusi keuangan yang ditemukan ini diharapkan mampu menciptakan UMKM kerajinan yang berkualitas dan berdaya saing.

Padang, September 2022

Tim Peneliti



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN	9
A. Literasi Keuangan	9
B. Inklusi Keuangan	23
BAB 3 METODE PENELITIAN	41
A. Desain Penelitian	41
B. Objek Penelitian	41
C. Prosedur Penelitian	42

D.	Sumber Data	43
E.	Teknik Pengumpulan Data	43
F.	Teknik Analisis Data	44
G.	Definisi Operasional	44
BAB 4	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	47
A.	Gambaran Umum Objek	47
B.	Analisis Profil Responden	48
C.	Deskripsi Variabel Penelitian	51
D.	Keterkaitan Literasi Keuangan dengan Inklusi Keuangan	53
BAB 5	MODEL INKLUSI KEUANGAN	55
A.	Identifikasi Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank	55
B.	Melakukan <i>Focus Group Discussion</i>	56
C.	Analisis Lingkungan Internal (IFAS) UMKM Kerajinan Sulaman	62
D.	Analisis Lingkungan Eksternal (EFAS) UMKM Kerajinan Sulaman	64
E.	Analisis <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats</i> (SWOT)	65
F.	Nilai Faktor Internal-Eksternal (IE)	66
G.	Analisis Internal-Eksternal (IE) Matriks	67
H.	Model Inklusi Keuangan	70
BAB 6	PENUTUP	73
A.	Rekomendasi	73
B.	Implikasi	74
	DAFTAR PUSTAKA	77
	GLOSARIUM	81
	INDEKS	83
	BIODATA PENULIS	85



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Dimensi dan Indikator Keuangan Inklusif	29
Tabel 2.2	Karakteristik Kelompok Sasaran	35
Tabel 2.3	Penelitian yang Relevan	39
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	45
Tabel 4.1	Rekapitulasi Data Literasi Keuangan	52
Tabel 4.2	Rekapitulasi Data Inklusi Keuangan	53
Tabel 5.1	<i>Internal Factor Analysis Summary (IFAS)</i> Matriks Inklusi Keuangan pada UMKM Kerajinan Sulaman/Sulaman Berbasis Perdesaan di Kecamatan Pariaman Utara	63
Tabel 5.2	<i>External Factor Analysis Summary (EFAS)</i> Matriks Inklusi Keuangan pada UMKM Kerajinan Sulaman/Sulaman Berbasis Perdesaan di Kecamatan Pariaman Utara	64
Tabel 5.3	Analisis Matriks SWOT Penerapan Inklusi Keuangan	66
Tabel 5.4	Nilai Strategi SWOT	66
Tabel 5.5	Matriks Internal-Eksternal	67

Dummy



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kesulitan Menjalankan Usaha Sektor Kerajinan	2
Gambar 2.1	<i>Concept of Financial Literacy</i>	11
Gambar 2.2	Manfaat Literasi Keuangan	13
Gambar 2.3	Skala Skor <i>Financial Literacy</i>	20
Gambar 2.4	Komponen <i>Financial Inclusion</i>	27
Gambar 2.5	Enam Pilar Strategi Keuangan Inklusif	31
Gambar 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
Gambar 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet	48
Gambar 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Nilai Investasi	49
Gambar 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Modal	50
Gambar 4.5	Penggunaan Produk dan Jasa Keuangan	50
Gambar 4.6	Produk Perbankan yang Digunakan	51
Gambar 5.1	Model Inklusi Keuangan pada UMKM Kerajinan Sulaman di Perdesaan di Sumatra Barat	72

Dummy



1

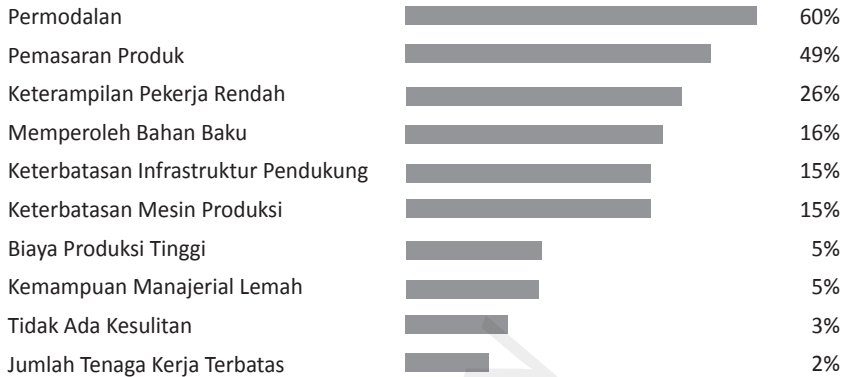
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif, maka diperlukan upaya nyata yang mampu mendorong kegiatan ekonomi produktif. Salah satu sektor ekonomi produktif yang perlu dikembangkan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memegang peranan besar dalam menghidupkan perekonomian di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan usaha besar yakni mencapai pangsa pasar sebanyak 99,99% (Kemenkop, 2013). UMKM mampu menopang dan menghidupkan perekonomian suatu daerah dan dapat memberikan sumbangsih besar bagi kesejahteraan ekonomi bagi setiap kepala keluarga yang ada di sekitarnya. Namun, kondisi UMKM tak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis UMKM, salah satunya adalah UMKM kerajinan. Kondisi UMKM tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, di antaranya seperti: pengelolaan usahanya yang mayoritas masih tradisional, kualitas SDM pengelola yang masih terbatas, masih terbatasnya kemampuan manajemen dan penggunaan teknologi informasi modern, kemampuan pemasaran dan akses informasi yang terbatas, serta masih terbatasnya akses kredit kepada lembaga pembiayaan.

Hasil survei yang dilakukan oleh Tim Bank Dunia tahun 2014 terhadap UMKM kerajinan di Indonesia diperoleh gambaran tentang kesulitan UMKM kerajinan dalam menjalankan usahanya (BI-Tim, 2014). Kesulitan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1 Kesulitan Menjalankan Usaha Sektor Kerajinan

Sumber: Survei diolah oleh Tim Bank Dunia (2014)

Berdasarkan survei tersebut terlihat bahwa kesulitan terbesar yang dialami oleh pelaku usaha kerajinan dalam menjalankan usahanya adalah masalah permodalan, pemasaran, dan keterampilan sumber daya manusia. Pada umumnya sumber permodalan dari usaha kerajinan hanya berupa ekuitas atau modal sendiri yang berasal dari dana pribadi ataupun keluarga. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat inklusi keuangan pengelola UMKM kerajinan. Oleh karena itu, diperlukan program atau model-model inklusi keuangan yang mampu mempercepat akses UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal keuangan di daerah.

Perekonomian Sumatra Barat masih ditopang oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terlihat komposisi sektor usaha yang masih didominasi usaha mikro yang persentasenya mencapai 84%, disusul sektor kecil sebesar 14%, dan usaha menengah hanya sekitar 1,5% dan bisa dikatakan tidak ada industri skala besar (Hap., 2017). Oleh karena itu, upaya pengembangan UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian Sumatra Barat.

Salah satu produk unggulan yang menjadi andalan Sumatra Barat adalah kerajinan berupa sulaman, sulamanan, tenun, perak, dan mebel. Namun, dalam perkembangannya usaha ini masih menghadapi

beberapa masalah. Permasalahan utama dalam pengembangan UMKM kerajinan adalah dalam hal permodalan dan pemasaran (Rosyeni, 2016). Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Sumber permodalan dari usaha kerajinan pada umumnya hanya berupa ekuitas atau modal sendiri yang berasal dari dana pribadi ataupun keluarga. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 60 pelaku usaha kerajinan sulaman benang emas di Kota Padang Sumatra Barat, ditemukan komposisi sumber dana dari usaha kerajinan, di mana sebesar 47% menggunakan 100% modal sendiri, yang berasal dari tabungan mereka sendiri serta bantuan dari keluarga dan teman, sebesar 45% menggunakan sedikit utang, dan hanya sebesar 8% pengusaha yang menggunakan utang bank yang lebih banyak dalam komposisi modalnya (Rasyid, 2016). Hal ini mengindikasikan masih minimnya akses pengusaha kerajinan di Kota Padang terhadap lembaga keuangan.

Menurut (Sachindra, 2013) Beberapa hal yang menghambat masyarakat dalam mengakses keuangan formal di antaranya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat, tingginya biaya, hambatan nonharga seperti masalah administrasi dan sejenisnya serta aspek perilaku seperti persepsi masyarakat terhadap bank. Menurut (Rakhmindyarto & Syaifullah, 2013) faktor yang menghambat akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Hambatan dari sisi permintaan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap jasa keuangan, rendahnya pendapatan, tidak adanya jaminan dan sosial. Hambatan dari sisi penawaran di antaranya yaitu jauhnya jarak akses bank dengan tempat tinggal, prosedur yang rumit, ketidaksesuaian produk keuangan dengan kebutuhan, bahasa yang kurang dimengerti nasabah, perilaku pegawai, dan waktu operasi bank yang kaku. Sedangkan menurut Gubernur Bank Indonesia, salah satu penyebab minimnya akses UMKM ke lembaga keuangan dapat disebabkan karena rendahnya tingkat literasi keuangan pelaku UMKM. Pada umumnya pelaku UMKM hanya mengetahui tentang perbankan, dan mereka cenderung kurang mengerti produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya, sehingga hanya mampu bergantung pada pembiayaan perbankan yang manual dan konvensional. Hal ini tentunya dapat memperlambat perkembangan UMKM, karena

perkembangan UMKM akan sejalan dengan tingkat melek keuangan dan kedekatan UMKM terhadap akses keuangan (Martowardjojo, 2016).

Untuk menanggapi permasalahan tersebut terutama dari segi permodalan dan pemasaran, diperlukan suatu model inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Inklusi keuangan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan yang ada sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha. Oleh karena itu, kebutuhan akan pengembangan model akses inklusi keuangan dan kompetensi pemasaran pada pelaku usaha UMKM kerajinan sangat diperlukan sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM kerajinan di Kota Sumatra Barat.

Salah satu UMKM yang punya potensi untuk dikembangkan di Sumatra Barat adalah UMKM kerajinan sulaman. Banyak daerah di Sumatra Barat yang merupakan sentra penghasil sulaman, salah satunya adalah Kota Pariaman yang terkenal dengan sulaman benang emas. Sulaman benang emas ini sudah menjadi kegiatan kaum perempuan yang diwarisi sejak lama. Sentra industri sulaman benang emas di Kota Pariaman terdapat di Kecamatan Pariaman Utara. Ada empat desa yang menjadi sentra sulaman benang emas di Kecamatan Pariaman Utara di antaranya Desa Nareh I, Desa Manggung, Desa Nareh Hilia dan Desa Balai Nareh.

Permasalahan utama dalam UMKM sulaman benang emas di Kota Pariaman adalah dalam hal permodalan dan pemasaran. Untuk menanggapi permasalahan tersebut terutama dari segi permodalan dan pemasaran, diperlukan suatu model inklusi keuangan yang dapat membantu dan mempermudah pengusaha kerajinan yang berada di perdesaan untuk akses ke lembaga keuangan dan meningkatkan pemasaran. Oleh karena itu, kebutuhan akan pengembangan model inklusi keuangan dan pemasaran pada UMKM kerajinan sulaman sangat diperlukan sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing UMKM kerajinan sulaman di Kota Sumatra Barat.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan inklusi keuangan pada UMKM, serta menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan dalam penerapan inklusi keuangan, sehingga pada akhirnya

dapat dirumuskan suatu strategi yang efisien dan efektif berdasarkan hasil analisis SWOT untuk meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM kerajinan sulaman, selanjutnya dilakukan wawancara terhadap lembaga keuangan dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan inklusi keuangan bagi UMKM kerajinan sulaman yang berada di perdesaan, sehingga pada akhirnya akan ditemukan suatu model inklusi keuangan untuk UMKM di perdesaan. Dengan model tersebut, diharapkan akan terbentuk UMKM kerajinan sulaman yang berkualitas dan berdaya saing. Penelitian ini membantu mendukung Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Negeri Padang tahun 2016–2020, di bidang sumber daya, ekonomi dan bisnis, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan pemasaran dan peningkatan daya saing produk unggulan Sumatra Barat.

B. Perumusan Masalah

Masih terbatasnya akses UMKM kerajinan terhadap sektor keuangan formal dapat disebabkan oleh adanya hambatan yang secara umum dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu dari sisi permintaan (*demand barriers*) dan dari sisi penawaran (*supply barriers*). Untuk itu diperlukan model inklusi keuangan yang efektif bagi pengembangan UMKM kerajinan sulaman di perdesaan Sumatra Barat.

Untuk itu mengembangkan model inklusi keuangan pertama perlu diketahui tingkat literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan dari pelaku usaha kerajinan, serta melihat keterkaitan literasi keuangan dengan inklusi keuangan. Selanjutnya mengungkapkan hambatan-hambatan yang ditemui dari sisi penawaran (*supply barriers*), sehingga dapat ditemukan model pengembangan inklusi keuangan yang dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan pada UMKM kerajinan sulaman di Kabupaten Padang Pariaman Sumatra Barat.

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tingkat literasi keuangan pelaku UMKM kerajinan sulaman di Sumatra Barat.
2. Faktor-faktor apa yang menghambat akses UMKM kerajinan sulaman ke lembaga-lembaga keuangan formal.
3. Bagaimana penerapan inklusi keuangan pada UMKM kerajinan sulaman di Sumatra Barat.

4. Bagaimanakah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penerapan inklusi keuangan pada UMKM kerajinan sulaman di Sumatra Barat.
5. Bagaimanakah model inklusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM kerajinan sulaman dan sulaman di Sumatra Barat.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) Universitas Negeri Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menyinergikan penelitian di perguruan tinggi dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan lokal/nasional/internasional melalui kepakaran perguruan tinggi, sarana, dan prasarana penelitian, dan/atau sumber daya setempat.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menemukan model pengembangan inklusi keuangan yang bermanfaat dalam meningkatkan daya saing akses UMKM kerajinan sulaman dan sulaman di Kabupaten Padang Pariaman Sumatra Barat.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat literasi keuangan pelaku UMKM kerajinan sulaman di Sumatra Barat.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat akses UMKM kerajinan sulaman ke lembaga-lembaga keuangan formal.
3. Mengetahui penerapan inklusi keuangan pada UMKM kerajinan sulaman dan sulaman perdesaan di Kabupaten Padang Pariaman dari sisi penawaran (*supply barriers*) agar dapat meningkatkan inklusi keuangan UMKM kerajinan sulaman dan sulaman di Kabupaten Padang Pariaman Sumatra Barat.
4. Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penerapan inklusi keuangan pada UMKM kerajinan sulaman di Sumatra Barat.
5. Menemukan model pengembangan inklusi keuangan dan kompetensi pemasaran yang bermanfaat dalam meningkatkan daya saing UMKM kerajinan sulaman di Padang Sumatra Barat.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi dari penelitian yang akan dilakukan adalah ditemukannya sebuah model inklusi keuangan yang dapat memberi kontribusi kepada UMKM kerajinan sulaman dalam menyelesaikan masalah permodalan dan pemasaran, dan bagi pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat meningkatkan akses permodalan dan peningkatan daya saing UMKM kerajinan sulaman dan sulaman, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Dummy

Dummy

2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Literasi Keuangan

1. Pengertian Literasi Keuangan

Terdapat beberapa definisi tentang literasi keuangan. Literasi keuangan terkait dengan kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang. Lusardi (2012) menyatakan bahwa pengetahuan dasar atas konsep investasi keuangan seperti inflasi dan risiko serta kemampuan untuk melakukan perhitungan yang berkaitan dengan suku bunga akan menunjukkan kemampuan literasi keuangan mereka. Menurut (Chen & Volpe, 1998) literasi keuangan merupakan kemampuan mengelola keuangan agar hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang. Menurut (Xu & Zia, 2012), literasi keuangan mencakup pengetahuan mengenai konsep keuangan, kemampuan mengomunikasikan pemahaman terkait dengan konsep keuangan, kecakapan dalam pengelolaan keuangan usaha, serta kemampuan mengambil keputusan bisnis secara strategis dan relatif tepat dalam situasi tertentu (Hung, Parker, & Yoong, 2009; Manurung & Manurung, 2009 ; Oseifuah, 2010; Fatoki, 2014 ; Aribawa, 2016; Puspitaningtyas, 2017).

Literasi keuangan tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan tentang keuangan, akan tetapi juga kemampuan dalam mengelola

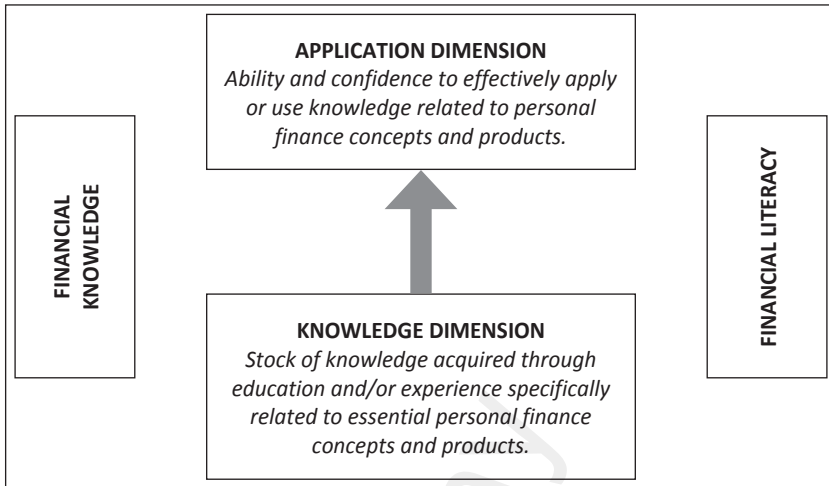
keuangan dan mengambil keputusan keuangan yang relatif tepat untuk kepentingan masa depan. Pengertian ini selaras dengan definisi literasi keuangan yang dikemukakan OJK, di mana literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, literasi keuangan juga merupakan pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membuat keputusan (OECD, 2016). Definisi lainnya menyebutkan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan mengenai fakta, konsep, prinsip dan alat teknologi yang mendasari untuk cerdas dalam menggunakan uang (Garman & Fogue, 2010). Selanjutnya menurut Kiyosaki (2003) literasi keuangan merupakan kemampuan untuk membaca dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan masalah finansial/keuangan. Menurut (Paiella, 2016), melek keuangan merupakan kemampuan untuk mengumpulkan informasi penting serta memiliki kemampuan membedakan antara pilihan keuangan yang beragam, membahas masalah keuangan, perencanaan dan solusi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya menurut (Huston, 2009) literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai pengukuran seberapa baik seorang individu dapat memahami dan menggunakan informasi yang terkait dengan keuangan.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi keuangan adalah merupakan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau pelaku usaha untuk mengelola keuangan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, yang pada akhirnya keputusan yang dibuat dapat berdampak pada masyarakat, perusahaan, negara, dan ekonomi secara global.

2. Konsep Literasi Keuangan

Secara umum literasi keuangan dikonseptualisasikan dalam dua dimensi yaitu dimensi pemahaman yang terkait dengan pengetahuan keuangan pribadi, dan dimensi penggunaan yang terkait dengan aplikasi keuangan pribadi yang seseorang memiliki kemampuan dan kepercayaan diri atas pengetahuan keuangan yang dimilikinya untuk digunakan dalam

pengambilan keputusan keuangan (Houston, 2009). Konsep literasi keuangan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Concept of Financial Literacy

Berdasarkan konseptual literasi keuangan yang digambarkan pada Gambar 2.1 di atas, literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai cara untuk mengukur seberapa baik seseorang dapat memahami dan menggunakan informasi terkait keuangan pribadi. Hal ini terkait dengan kemampuan dan kepercayaan diri untuk menerapkan atau menggunakan pengetahuan yang berkaitan dengan konsep keuangan pribadi secara efektif (*application dimension*) dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan/pengalaman yang terkait dengan konsep keuangan pribadi.

3. Tujuan dan Manfaat Literasi Keuangan

Secara umum literasi keuangan dipakai sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan beserta produk dan jasa yang keuangan yang tersedia. Literasi keuangan bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang konsep dasar keuangan agar masyarakat maupun pelaku bisnis dapat menanggulangi pengeluaran mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, literasi keuangan tidak hanya konsep yang berkaitan dengan keuangan, tetapi lebih kepada bagaimana mengelola keuangan serta ketepatan pengambilan keputusan dalam

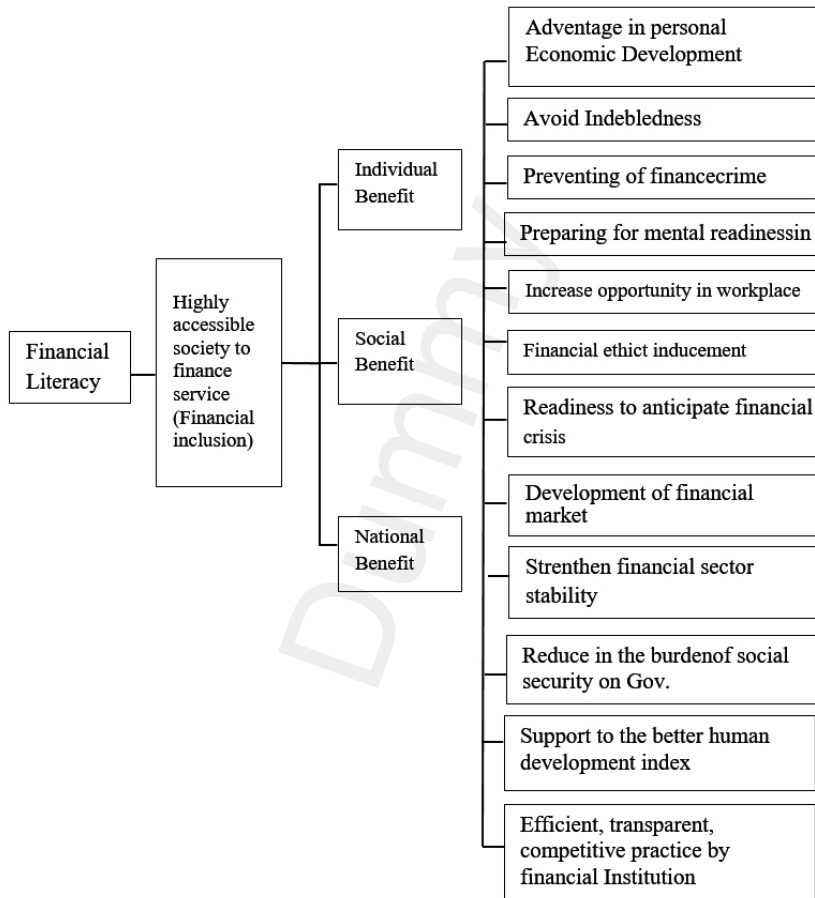
kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat memiliki tingkat literasi keuangan yang baik, maka akan ada kecenderungan untuk mampu mengelola keuangan secara lebih baik. Selanjutnya bagi pelaku usaha yang memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik maka akan mampu mengelola keuangan pada unit usahanya secara lebih baik, sekaligus mampu mengidentifikasi serta mengakses berbagai peluang.

Literasi keuangan sangat bermanfaat bagi setiap individu dalam jangka panjang. Terutama dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, seperti saat mengambil keputusan untuk menabung (*saving*) atau investasi (*investment*) dan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Seseorang dapat mengelola dan memanfaatkan setiap peluang untuk kesejahteraan di masa datang. Literasi keuangan juga berperan penting bagi pengusaha termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih baik dan menjaga keberlangsungan usahanya.

Salah satu yang menjadi kunci sukses bagi keberlangsungan usaha adalah tergantung pada tingkat pengetahuan dan kemampuan pengelolaan keuangan yang dimiliki pelaku usaha. Oleh karena itu, konsep *business sustainability* yang berorientasi pada pencapaian kinerja jangka panjang menjadi penting bagi suatu usaha, karena tanpa memiliki konsep pengembangan kinerja jangka panjang, maka kecenderungannya suatu usaha akan bergerak secara stagnan dan tidak terarah dengan baik. Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, maka pelaku usaha dinilai mampu menggunakan pengetahuan di bidang keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan terkait dengan keberhasilan dan keberlanjutan usahanya. Suatu perusahaan yang dikelola oleh pengusaha yang memiliki literasi keuangan yang baik akan dapat mencapai tujuan usahanya, memiliki orientasi pengembangan usaha, dan mampu menjaga *business sustainability*-nya. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis bagi pelaku usaha guna menjaga keberlanjutan usahanya (*business sustainability*).

Peningkatan literasi keuangan masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan dari masyarakat, sehingga potensi transaksi keuangan yang terjadi menjadi semakin tinggi. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan juga menciptakan pemerataan pendapatan

dan keadilan. Oleh karena itu, pengetahuan literasi keuangan juga sangat penting dan bermanfaat dari sisi makroekonomi. Pengetahuan tentang literasi keuangan sangat penting untuk dilakukan secara terus-menerus. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang baik menjadi jalan keluar dari beragam pekerjaan, termasuk pengurangan angka kemiskinan (Soetione, 2015). Manfaat literasi keuangan dapat digambarkan sebagai berikut (Jariwala & Sharma, 2011).



Gambar 2.2 Manfaat Literasi Keuangan

Terdapatnya banyak manfaat yang diperoleh dari peningkatan literasi keuangan yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan, sehingga pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), industri jasa keuangan, dan pihak terkait lainnya telah mempropagandakan berbagai program untuk menaikkan tingkat literasi keuangan Indonesia, melalui program yang mewajibkan lembaga jasa keuangan melakukan edukasi ke masyarakat dan juga melakukan edukasi keuangan ke sekolah-sekolah. Salah satu upaya yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah dengan melaksanakan program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia yang diharapkan akan membantu dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, selain dari OJK, para kaum akademisi harus ikut serta dalam proses edukasi keuangan karena mereka memiliki modal intelektual dari bangku kuliah yang harus disalurkan kepada masyarakat secara luas.

Dapat disimpulkan bahwa kecakapan dalam pemahaman, pengelolaan, perencanaan, serta pengalokasian sumber daya keuangan yang baik dan tepat sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan finansial dan taraf hidup yang lebih baik.

4. Tingkat Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan membagi tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia menjadi empat kategori, dari yang paling mengerti hingga tidak mengerti produk dan jasa keuangan, yaitu (OJK, 2016):

a. *Well literate*

Merupakan kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan dan kapabilitas dalam menggunakan produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

b. *Sufficient literate*

Merupakan kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban yang terkait dengan produk dan jasa keuangan.

c. *Less literate*

Merupakan kondisi di mana seseorang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

d. *Not literate*

Merupakan kondisi di mana seseorang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

5. Aspek-aspek Literasi Keuangan

Financial literacy mencakup beberapa aspek dalam keuangan, yaitu pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi (*basic personal finance*), manajemen uang (*money management*), manajemen kredit dan utang (*credit and debt management*), tabungan/simpanan (*saving*) dan investasi (*investment*), serta manajemen risiko (*risk management*). Semakin baik literasi keuangan masyarakat atau pengusaha, maka akan semakin baik mereka membuat perencanaan yang komprehensif dengan menggunakan kemampuan di bidang keuangan dalam pengambilan berbagai keputusan yang tepat untuk perusahaan mereka (Muruga & John, 2015).

Menurut Chen dan Volve (1998), literasi keuangan dapat diukur menggunakan empat indikator yaitu: pengetahuan dasar pengelolaan keuangan (*general personal finance*), pengelolaan kredit dan pengelolaan tabungan (*saving and borrowing*), investasi (*investment*), dan manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pengetahuan Dasar Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan dan pengelolaan fungsi-fungsi keuangan secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan dibagi ke dalam tiga fase, yaitu *financial planning*, *implementation*, dan *evaluation*. Pengetahuan dasar pengelolaan keuangan personal merupakan pengetahuan mengenai dasar-dasar prinsip keuangan yang dimiliki seseorang untuk nantinya akan digunakan sebagai acuan pengelolaan keuangan pribadi, keluarga dan usaha yang dimilikinya (Chen & Volpe, 1998).

Perencanaan keuangan (*financial planning*) adalah suatu proses di mana seorang individu atau pengusaha berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan keuangan mereka melalui pengembangan dan implementasi dari sebuah rencana keuangan (*financial plan*) yang menyeluruh. Setiap orang tentu membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan yang baik dimulai

dengan mempraktikkan sikap keuangan yang baik pula. Tanpa menerapkan sikap yang baik dalam keuangan, maka sulit untuk memperoleh surplus keuangan untuk tabungan masa depan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan perlu ada perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Secara konsep perencanaan keuangan tersebut merupakan aktivitas yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- Memiliki tujuan-tujuan keuangan yang mau dicapai,
- Memiliki jangka waktu atau periode untuk mencapai tujuan tersebut,
- Mempunyai rencana kegiatan (*action plan*) yang jelas dan realistis untuk dilakukan,
- Memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk menjalankan *action plan* tersebut,
- Memuat sejumlah faktor risiko yang terkait dengan pilihan sumber daya yang akan digunakan.

Kenyataan di lapangan terlihat masih banyak individu yang sering mengatakan bahwa mereka memiliki rencana keuangan, akan tetapi mereka tidak bisa menyebutkan tujuan keuangan mereka secara pasti. Perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan rencana keuangan (*financial plan*) yang spesifik, sehingga memudahkan perencanaan dalam mencapai tujuan finansialnya. Rencana keuangan ini seperti sebuah rencana kerja yang terperinci (*blueprint*) yang dapat menentukan ke mana arah kondisi keuangan individu/keluarga atau pengusaha akan berjalan. Sebuah rencana keuangan yang menyeluruh dan lengkap terdiri dari empat bagian berikut.

- Manajemen kekayaan atau manajemen keuangan keluarga (*wealth management*),
- Perencanaan asuransi (*risk and insurance planning*), untuk mengantisipasi risiko,
- Perencanaan pensiun (*pension planning*), dengan mempertimbangkan nilai waktu uang,
- Perencanaan pengalihan harta bawaan (*pension planning*), termasuk perencanaan hibah dan waris.

b. Pengelolaan Kredit

Merupakan suatu proses di mana peminjam atau debitur mengatur kredit yang diperoleh secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan awal pengajuan kredit sampai kredit tersebut dilaporkan lunas (Sevim, Temizel, & Sayilir, 2012). Melakukan pengelolaan kredit berarti melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, di mana pemilik kredit atau debitur melakukan proses untuk mengatur kredit yang dimiliki agar digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan awal melakukan kredit dimulai sejak kredit tersebut diajukan hingga kredit tersebut dinyatakan lunas. Manajemen kredit yang dikelola secara efektif dan efisien dapat meningkatkan keuntungan bagi sebuah usaha.

c. Pengelolaan Tabungan dan Investasi

Tabungan merupakan simpanan uang yang mana penarikan hanya dapat dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu menurut yang disepakati. Sedangkan investasi adalah segala bentuk aktivitas penanaman modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya pada suatu pihak dengan harapan akan mendapat keuntungan di masa datang. Penanaman modal dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang melakukan usaha di wilayah Indonesia. Dalam kondisi yang lebih makro, investasi dan tabungan bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi kedua hal tersebut adalah suatu kesatuan. Pengelolaan suatu tabungan bertujuan untuk kemudahan akses likuiditas, perencanaan keuangan dan keamanan. Sedangkan pengelolaan investasi merupakan proses yang membantu untuk merumuskan kebijakan dan tujuan serta pengawasan terhadap penanaman modal guna memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, kurangnya pengetahuan keuangan serta rendahnya tingkat literasi keuangan dapat menimbulkan kesalahan persepsi dan kesalahan dalam mengambil keputusan dalam penyimpanan, peminjaman dan investasi.

d. Manajemen Risiko

Risiko adalah suatu ketidakpastian yang bisa terjadi di masa datang atau sebuah kemungkinan kejadian atau peristiwa yang merugikan perusahaan atau bisnis, di mana kejadian tersebut tidak dapat diprediksi. Manajemen risiko adalah pendekatan terstruktur

dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Tujuan dari manajemen risiko adalah menghindari atau meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan timbul dari keputusan yang telah dibuat. Untuk menanggulangi risiko dapat dilakukan dengan mengasuransikan aset ataupun hal-hal yang kemungkinan berisiko. Kebanyakan individu cenderung menghindari situasi yang menimbulkan rasa tidak aman ataupun tidak berkecukupan. Sangat penting untuk dapat menghadapi risiko dengan cara yang logis dan terkendali. Respons tiap individu berbeda-beda terhadap risiko, tergantung pengalaman masa lalu serta motivasi psikologis, oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan atau literasi keuangan yang mencukupi untuk dapat mengelola risiko tersebut, sehingga dapat terhindar dari risiko yang kemungkinan terjadi akibat kurangnya pengetahuan.

Selanjutnya menurut Nababan dan Sadalia (2013) aspek-aspek dalam literasi keuangan meliputi:

a. *Basic Personal Finance*

Merupakan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh individu dalam memahami sistem keuangan seperti inflasi, suku bunga, likuiditas aset, kredit dan lain sebagainya.

b. *Cash Management* (Manajemen Uang)

Merupakan kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan mereka secara baik dan tepat. Jika seorang individu memiliki tingkat literasi keuangan yang baik maka akan semakin baik juga mereka dalam mengelola keuangannya.

c. *Credit and Debt Management* (Manajemen Kredit)

Merupakan suatu proses kegiatan yang saling berintegrasi antara satu dengan yang lainnya dari sumber-sumber dana kredit secara sistematis dalam pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. Sedangkan *debt management* (manajemen utang) adalah proses pembayaran utang dengan melibatkan pihak ketiga untuk membantu orang yang terlibat utang.

d. *Saving* (Tabungan)

Merupakan simpanan uang yang berasal dari penghasilan seseorang yang tidak digunakan untuk konsumsi atau keperluan lainnya. Tabungan tersebut disimpan di bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Kemampuan literasi keuangan dapat membuat seseorang mampu untuk menyisihkan sebagian dari sumber pendapatannya untuk tabungan.

e. *Investment* (Investasi)

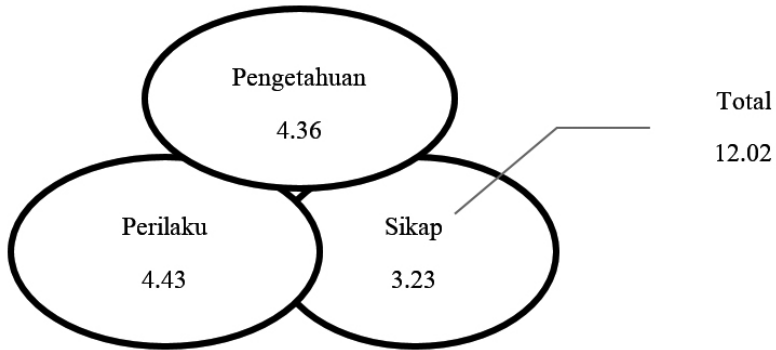
Berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang investasi. Bagaimana seorang individu menggunakan keuangan mereka untuk mendapatkan manfaat ekonomis yang lebih di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan tentang pengetahuan seseorang tentang pasar modal, reksadana, deposito, suku bunga, dan lain-lain.

f. *Risk management* (Manajemen Risiko)

Merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam menghadapi dan penanggulangan risiko, termasuk risiko yang dihadapi oleh perusahaan, keluarga dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang dihadapi atau mengoptimalkan keuntungan yang ada.

Berdasarkan komponen literasi keuangan tersebut, maka ruang lingkup literasi keuangan meliputi pengetahuan tentang konsep keuangan, keterampilan berkomunikasi tentang konsep keuangan, keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi, kemampuan dalam membuat keputusan keuangan, serta keyakinan untuk membuat perencanaan keuangan masa depan.

Untuk menggambarkan tingkat literasi keuangan suatu negara dapat dilihat dari skor *financial literacy* yang dibangun dari 3 dimensi, yaitu pengetahuan keuangan, sikap terhadap keuangan dan perilaku keuangan yang kemudian diintegrasikan menjadi skor total untuk menggambarkan tingkat melek keuangan suatu negara dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Skala Skor *Financial Literacy*

6. Faktor-faktor Penentu Literasi Keuangan

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi literasi keuangan seseorang. Worthington (2006) menemukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat literasi keuangan, adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan, etnis atau ras, dan pekerjaan. Selanjutnya Mandell (2008) menemukan bahwa demografi yang merupakan gambaran mengenai latar belakang seseorang merupakan faktor yang memengaruhi literasi keuangan seseorang. Menurut (Keown & Anne, 2011), faktor demografi tersebut meliputi usia, jenis kelamin, status keluarga, status migrasi, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tempat tinggal dan regional. Selanjutnya (Nidar & Bestari, 2012) menyatakan bahwa faktor demografi yang memengaruhi literasi keuangan meliputi tingkat pendidikan orangtua, uang saku, tingkat pendidikan, fakultas, pendapatan orangtua dan asuransi. Penelitian yang dilakukan oleh (Mahdzan, Shahnaz, Tabiani, & Saleh, 2013) mengungkapkan bahwa faktor demografi yang berpengaruh adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah anak, status menikah dan pengalaman bekerja. Lusardi (2010) mengemukakan bahwa ada tiga hal yang memberikan pengaruh terhadap kemampuan literasi keuangan, yaitu:

a. Sosiodemografi

Adanya perbedaan pemahaman antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dianggap memiliki kemampuan literasi keuangan yang lebih tinggi daripada perempuan. Begitu juga dengan kemampuan kognitifnya termasuk kemampuan untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.

b. Latar belakang keluarga

Pendidikan seorang ibu dalam sebuah keluarga berpengaruh kuat pada literasi keuangan, khususnya ibu yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi, di mana mereka unggul 19% lebih tinggi daripada yang lulusan sekolah menengah.

c. Kelompok pertemanan

Merupakan kelompok atau komunitas seseorang yang akan memengaruhi literasi keuangan seseorang, dan memengaruhi pola konsumsi dan penggunaan dari uang yang ada.

Menurut Ansong dan Gyensare (2012) menyatakan faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan:

a. Gender

Perbedaan gender sangat berpengaruh dalam pengelolaan keuangan, di mana laki-laki lebih mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dalam membuat keputusan keuangan dibanding dengan perempuan, di mana perempuan cenderung lebih menghindari risiko (*risk averse*) dibandingkan laki-laki.

b. Usia

Usia seseorang menunjukkan banyaknya pengalaman yang diperoleh seseorang semasa hidupnya termasuk pengalamannya dalam masalah keuangan sehingga semakin berpengalaman sehingga pengambilan keputusan keuangan mereka akan semakin baik pula.

c. Tingkat pendidikan orangtua

Orangtua yang memiliki tingkat pendidikan dengan strata yang lebih tinggi biasanya akan mengajarkan pengetahuan mereka tentang keuangan kepada anaknya terlebih lagi jika orangtua tersebut berada pada jalur atau jurusan bidang keuangan. Oleh sebab itu, pengetahuan anak itu turun dari orangtuanya.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum faktor demografi berpengaruh terhadap literasi keuangan. Demografi merupakan gambaran mengenai latar belakang seseorang sehingga dapat memengaruhi literasi keuangan mereka. Faktor demografi tersebut meliputi usia, jenis kelamin, status keluarga, status migrasi, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, status, pengalaman kerja, serta tempat tinggal dan regional.

7. Indikator Literasi Keuangan

Terdapat beberapa elemen kunci dari kemampuan dan pengetahuan literasi keuangan yang biasanya disebutkan dalam literatur. Menurut Wise (2013), yaitu:

- a. Pengetahuan matematis dan pengetahuan standar seperti angka dasar dan kemampuan dalam memahami.
- b. Pemahaman keuangan mengenai sifat dasar dan bentuk uang, bagaimana uang digunakan dan konsekuensi dari keputusan konsumsi.
- c. Kompetensi keuangan seperti memahami ciri-ciri utama dari layanan dasar keuangan, sikap dalam menggunakan uang dan tabungan, memahami pencatatan keuangan dan menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya.
- d. Sadar akan risiko-risiko yang berhubungan dengan produk keuangan, dan memahami hubungan antara risiko dan pendapatan.
- e. Tanggung jawab keuangan, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai isu-isu keuangan, mengetahui hak dan tanggung jawab konsumen, kemampuan, dan kepercayaan untuk mencari bantuan ketika sesuatu berjalan tidak semestinya.

Australian Securities & Investment Commission mengemukakan bahwa untuk mengetahui berapa tingkat literasi keuangan seseorang, maka dapat digunakan tolok ukur atau indikator pengetahuan, di antaranya seperti:

- a. Pengetahuan seseorang terhadap nilai suatu barang dan skala prioritas dalam hidupnya.
- b. Penganggaran, tabungan serta bagaimana mengelola uang.
- c. Pengelolaan terhadap kredit.
- d. Pentingnya asuransi dan melindungi terhadap risiko.
- e. Dasar investasi.
- f. Perencanaan pensiun.
- g. Pemanfaatan dari belanja dan membandingkan produk di mana harus pergi mencari saran dan informasi bimbingan, dan dukungan tambahan.
- h. Bagaimana mengenali potensi konflik atas kegunaan (prioritasi).

B. Inklusi Keuangan

1. Pengertian Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan salah satu cara untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan literasi keuangan masyarakat akan diikuti dengan inklusi keuangan masyarakatnya. Adanya ketersediaan dan kesiapan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebut dengan (OJK, 2016). Inklusi keuangan juga merupakan upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun nonharga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Alamsyah, 2015).

Global Financial Development Report (2014) menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan suatu kondisi di mana sebagian besar individu bisa memanfaatkan jasa keuangan yang ada serta dapat meminimalisir jumlah kelompok individu yang belum menyadari akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia dengan biaya yang rendah dan terjangkau. Keuangan inklusif diartikan sebagai kondisi di mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses ke berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya murah dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Layanan ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tingkat penggunaan layanan keuangan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari bagaimana penduduk menabung, meminjam uang, melakukan pembayaran, dan menata risiko yang dihadapi.

Menurut Sanjaya (2014), inklusi keuangan merupakan penyediaan akses bagi masyarakat termarginalkan, yang maksudnya lebih kepada masyarakat miskin, dengan tujuan agar dapat memiliki dan menggunakan layanan sistem keuangan. Inklusi keuangan merupakan suatu keadaan di mana semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit serta menjunjung harga diri dan kehormatan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah suatu keadaan di mana setiap orang dapat

memiliki akses dalam menggunakan produk layanan jasa keuangan, seperti pinjaman, asuransi, tabungan, atau memanfaatkan produk transaksi digital seperti *mobile-banking*, *SMS banking*, *internet banking* atau uang elektronik yang berasal dari perusahaan tertentu.

2. Pentingnya Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Tingginya tingkat inklusi keuangan suatu negara menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat negara tersebut dalam menggunakan jasa keuangan formal dan sebaliknya rendahnya keuangan inklusif menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan formal. Peningkatan tingkat keuangan inklusif diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan melalui peningkatan jasa keuangan formal yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Shankar (2013), menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya inklusi keuangan, yaitu:

- a. Ketidakmampuan untuk mengakses jasa keuangan dapat menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak merasa terbantu dengan hadirnya perbankan dalam memperoleh permodalan.
- b. Kurangnya akses menuju tabungan yang aman dan formal dapat menghambat keinginan mereka untuk menyimpan.
- c. Kurangnya produk kredit, yang berarti ketidakmampuan untuk melakukan investasi dan usaha meningkatkan mata pencaharian mereka.
- d. Masih kurangnya produk remitansi menyebabkan transfer uang menjadi sulit dan berisiko tinggi.
- e. Kurangnya produk asuransi menyebabkan kurangnya peluang untuk manajemen risiko dan meratakan kesejahteraan.

3. Tujuan Inklusi Keuangan

Visi nasional inklusi keuangan ditujukan untuk menciptakan sistem keuangan yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terwujudnya stabilitas keuangan di Indonesia. Jadi

terdapatnya hubungan yang positif antara inklusi keuangan dengan pertumbuhan ekonomi. Visi tersebut diuraikan dalam beberapa tujuan, yaitu:

- a. Menjadikan keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.
- b. Menyediakan jasa dan produk-produk keuangan yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Namun, yang menjadi hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah.
- d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Selama ini terjadi hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi.
- e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan nonbank.
- f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

4. Manfaat Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan memiliki banyak manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha. Peningkatan keuangan yang semakin inklusif akan memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi pemerintah, dan bagi regulator (OJK, 2016):

- a. Manfaat inklusi keuangan bagi masyarakat antara lain adalah:
 - 1) Menjadi sarana “*keeping*” dan “*saving*” uang yang aman dan terjamin,
 - 2) Memperoleh peluang untuk masuk ke sistem ekonomi yang lebih luas dimulai dengan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang formal, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan,
 - 3) Membuka peluang akses kepada pembiayaan, asuransi, dan layanan pembayaran (remitansi),

- 4) Membantu perubahan perilaku pengelolaan keuangan,
 - 5) Membantu pemupukan aset.
- b. Manfaat inklusi keuangan bagi pemerintah adalah:
- 1) Membantu penurunan tingkat kemiskinan dan pemupukan aset,
 - 2) Membantu peningkatan aktivitas ekonomi lokal
 - 3) Efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.
- c. Manfaat inklusi keuangan bagi regulator:
- 1) Membantu menurunkan resiko likuiditas dan risiko kredit,
 - 2) Membantu penurunan resiko sistematis.

Secara makro inklusi keuangan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan tingkat kemiskinan, hingga meminimalisir kesenjangan sosial. Selain itu, inklusi keuangan juga diharapkan mampu memberi sumbangsih lebih untuk negara, di antaranya sebagai berikut (Aderianti, 2018).

- a. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
- b. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- c. Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*.
- d. Mendukung ekspansi pasar keuangan.
- e. Menyumbangkan potensi pasar baru bagi perbankan.
- f. Meningkatkan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
- g. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional secara kontinu.
- h. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional secara kontinu.

5. Dimensi Inklusi Keuangan

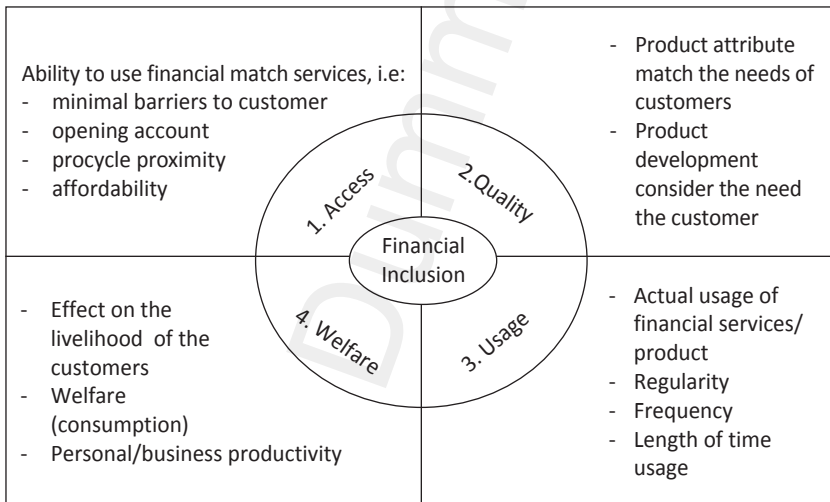
Terdapat empat dimensi inklusi keuangan, (OJK, 2017; BI, 2014) yaitu:

- a. Ketersediaan/akses lembaga keuangan, yang mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga. Secara lebih spesifik dimensi ini sebagai ketersediaan infrastruktur agar masyarakat dapat menjangkau, baik lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal. Indikator dari dimensi akses ialah: ketersediaan infrastruktur lembaga

keuangan; jarak lembaga keuangan; dan keterjangkauan biaya menuju lembaga keuangan.

- b. Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, yang mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan. Indikator dari penggunaan adalah keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan.
- c. Kualitas, merupakan peningkatan kualitas, baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan maupun kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri.
- d. Kesejahteraan, mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

Alliance for Financial Inclusion (2010) secara umum mendefinisikan kompleksitas keuangan inklusif ke dalam 4 (empat) komponen, sebagai berikut (Alliance for Financial Inclusion, 2010).



Gambar 2.4 Komponen *Financial Inclusion*

Berdasarkan gambar di atas terlihat adanya 4 komponen dari inklusi keuangan, yaitu:

- a. Ketersediaan (*access*), yang mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
- b. Kualitas (*quality*), yang mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.

- c. Penggunaan (*usage*), yang mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, yang diukur berdasarkan keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan.
- d. Kesejahteraan (*welfare*), yang mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

6. Indikator Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan konsep yang multiaspek dan terdiri atas beberapa indikator, yang semuanya relevan dengan agenda pembangunan di suatu negara. Bank Indonesia (2014) berpendapat bahwa untuk melihat perkembangan inklusi keuangan diperlukan suatu ukuran kinerja yang dapat diukur dari beberapa jenis indikator di antaranya adalah:

- a. Indikator Akses, yang mencerminkan kedalaman jangkauan layanan keuangan, seperti pembukaan cabang bank di daerah perdesaan, memperluas informasi produk, atau menurunkan hambatan, seperti hambatan informasi dan biaya yang ditanggung masyarakat dalam melakukan akses ke lembaga keuangan.
- b. Indikator penggunaan, yang mengukur bagaimana nasabah menggunakan jasa keuangan, seperti keteraturan dan durasi dari penggunaan produk/jasa keuangan dari waktu ke waktu (misalnya rata-rata saldo tabungan, jumlah transaksi per rekening, jumlah pembayaran elektronik yang dibuat).
- c. Indikator kualitas, yang menjelaskan apakah produk dan jasa keuangan telah sesuai dengan kebutuhan konsumen, berbagai pilihan yang tersedia, dan kesadaran dan pemahaman klien tentang produk dan jasa keuangan. Pengukuran terhadap dimensi ini masih sukar untuk dilakukan dan saat ini beberapa lembaga internasional yang fokus dalam pengembangan keuangan inklusif sedang menyusun indikator dari dimensi kualitas beserta alat yang dipergunakan. Secara umum The Alliance for Financial Inclusion (AFI) menyepakati prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam menyusun indikator dari dimensi kualitas, meliputi ringkas (*conciseness*), spesifik (*specifity*), sederhana (*simplicity*), adanya perbaikan (*improvement*), dan perspektif nasabah. Selanjutnya Bank Indonesia mengembangkan indikator inklusi keuangan untuk setiap dimensi yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Dimensi dan Indikator Keuangan Inklusif

Dimensi	Indikator	Keterangan
Akses	Jumlah akses poin setiap 10.000 penduduk dewasa di level nasional, yang terbagi berdasarkan jenis dan unit administratif	<ul style="list-style-type: none"> - Akses poin - Tempat melakukan transaksi <i>cash in/cash out</i> (bank, agen/ UPLK) - Jenis akses poin - Unit administratif: provinsi dan kabupaten - Jumlah penduduk usia produktif
	Persentase jumlah unit administratif yang memiliki minimal 1 (satu) akses poin	<ul style="list-style-type: none"> - Unit administratif: provinsi dan kabupaten
	Persentase dari total populasi yang tinggal di suatu unit administratif yang memiliki minimal 1 (satu) akses poin	<ul style="list-style-type: none"> - Total populasi dalam provinsi dan kabupaten
	Jumlah akses poin per 10 km ²	<ul style="list-style-type: none"> - Akses poin: tempat melakukan transaksi <i>cash in/cash out</i> (bank, agen/ UPLK)
Penggunaan	Persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki minimal satu jenis rekening simpanan (untuk negara yang tidak memiliki data ini dapat menggunakan jumlah rekening simpanan per 10.000 penduduk)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rekening simpanan per 10.000 penduduk dewasa - Rekening simpanan: giro, tabungan, deposito jangka panjang
	Persentase jumlah penduduk yang memiliki minimal satu jenis rekening pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rekening pinjaman per 10.000 penduduk dewasa
Kualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan - Pengukuran dimensi kualitas dapat didekati melalui pengukuran tingkat <i>financial literacy</i> (melek keuangan). Skor <i>financial literacy</i> dibangun dari 3 dimensi, yaitu pengetahuan keuangan, sikap terhadap keuangan dan perilaku keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Skor pengetahuan tertinggi responden di Indonesia sebesar 6 (sama halnya dengan Albina, Armenia, Hungaria, Malaysia, Norwegia, Peru, Polandia, Inggris dan British Virgin Island) - 60,37% responden memiliki skor sikap terhadap keuangan di atas rata-rata (3,23) - 90% responden mendapatkan skor cukup tinggi yaitu 5 sampai dengan 9

Sumber: *Alliance for Financial Inclusion Set of Indicators*

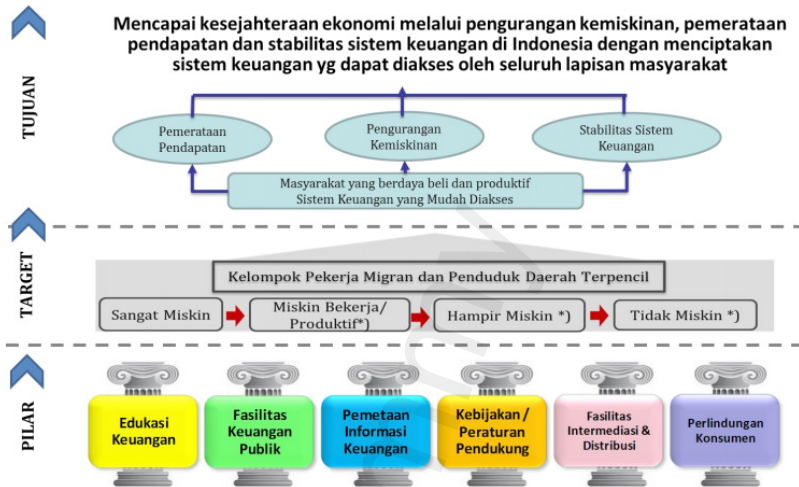
Sarma, *et al.* (2011) mengukur keuangan inklusif dengan menghitung proporsi dari populasi dewasa atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap jasa keuangan formal dengan menggunakan Indeks Keuangan Inklusif (IKI) yang terbagi atas tiga dimensi yaitu:

- a. Penetrasi perbankan. Penetrasi perbankan adalah indikator utama dalam inklusif keuangan. Salah satu indikatornya adalah jumlah penduduk yang memiliki rekening bank. Semakin banyak penduduk yang memiliki rekening maka semakin baik, karena hal itu menunjukkan sistem keuangan dapat menjangkau secara luas di antara penggunanya.
- b. Ketersediaan jasa keuangan. Dalam sistem keuangan yang inklusif, ukuran ketersediaan jasa keuangan ini adalah meliputi jumlah *outlet* (kantor cabang, ATM, dan lain lain). Ketersediaan jasa dapat dilihat dari jumlah cabang lembaga keuangan atau jumlah ATM (*Automatic Teller Machine*). ATM memiliki peranan yang sangat penting bagi jasa perbankan dalam melayani masyarakat pengguna lembaga keuangan. Kemudahan dalam mengambil tunai, penyetoran tunai serta digunakan untuk pembayaran membuat ATM menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat. Dengan adanya kantor cabang dan ATM, masyarakat akan semakin mudah menjangkau jasa keuangan.
- c. Penggunaan jasa perbankan. Banyak alasan mengapa sekelompok orang masih belum memanfaatkan keberadaan jasa keuangan meskipun mereka memiliki akses terhadap jasa keuangan. Di antaranya, jauhnya *outlet* bank dari tempat kediaman atau aktivitas sehari-hari, pengalaman buruk yang melibatkan penyedia jasa. Oleh sebab itu, memiliki rekening saja tidak cukup untuk menunjukkan suatu sistem keuangan yang inklusif, namun ukurannya adalah masyarakat menggunakannya. Seperti penggunaan dalam bentuk pinjaman/kredit, deposito, pembayaran, remitansi, maupun transfer. Pada dasarnya indikator yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan yang inklusif sebuah negara adalah ketersediaan dan akses untuk mengukur.

7. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

Untuk mewujudkan program-program yang diadakan oleh pemerintah ataupun pihak lainnya dalam rangka mengembangkan finansial inklusif,

maka dibentuklah program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai pedoman program pengadaan finansial inklusif. Strategi ini merupakan kerja sama dan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Strategi ini memiliki 6 pilar finansial inklusif yang dijadikan strategi untuk menyukseskan finansial inklusif. Sebagai gambaran 6 pilar inklusi keuangan dari kerangka inklusi keuangan berdasarkan *Internal Finance Corporation* dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.5 Enam Pilar Strategi Keuangan Inklusif

Enam pilar inklusi keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pilar 1: Edukasi Keuangan

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan, agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami produk-produk dan jasa keuangan, seperti pengetahuan tentang risiko produk-produk keuangan dan perlindungan terhadap nasabah. Edukasi keuangan ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di daerah perdesaan. Dengan Edukasi Keuangan ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman akan produk dan jasa keuangan di kalangan masyarakat.

Bank Indonesia menjelaskan tentang ruang lingkup dari edukasi keuangan ini meliputi:

- Pengetahuan dan pemahaman mengenai jenis-jenis produk dan jasa keuangan,
- Pengetahuan dan pemahaman mengenai risiko dari produk dan jasa keuangan,
- Pengetahuan dan pemahaman mengenai perlindungan nasabah,
- Pengetahuan dan pemahaman mengenai keterampilan pengelolaan keuangan.

Pilar 2: Fasilitas Keuangan Publik

Pilar ini mengacu kepada kemampuan dan peranan pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik. Pembiayaan publik yang dilakukan pemerintah dapat berupa pembiayaan yang diberikan secara langsung dan bantuan bersyarat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama lapisan masyarakat bawah. Contoh dari bantuan secara langsung adalah bantuan langsung tunai, dan contoh bantuan bersyarat adalah bantuan untuk UMKM. Ruang lingkup dari strategi ini adalah: subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMKM.

Pilar 3: Pemetaan Informasi Keuangan

Pilar ini merupakan peningkatan kapasitas masyarakat terutama yang sebelumnya dikategorikan tidak layak (*unbankable*) menjadi layak (*bankable*) untuk mendapatkan layanan keuangan dari institusi keuangan normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Ruang lingkup dari pilar ini meliputi persoalan:

- Peningkatan kapasitas dengan cara mengadakan pelatihan serta bantuan teknis,
- Membangun sistem jaminan alternatif yang lebih sederhana, akan tetapi tetap memperhitungkan risiko yang dapat ditimbulkan,
- Menyiapkan layanan kredit yang lebih sederhana,
- Mengidentifikasi dan mengenali nasabah potensial.

Pilar 4: Kebijakan/Peraturan yang Mendukung

Pilar ini terkait dengan kebijakan dan/atau peraturan yang mendukung pelaksanaan dan kelancaran ekonomi inklusif. Dengan adanya kebijakan tersebut maka diharapkan akses dan layanan jasa

keuangan di Indonesia menjadi makin meningkat. Pemerintah maupun Bank Indonesia dapat berperan dalam membuat kebijakan dan peraturan tersebut. Untuk mendukung pilar ini, ada enam gagasan, di antaranya:

- Kebijakan yang mendorong sosialisasi produk jasa keuangan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- Membenahi skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- Menggiat perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional,
- Menyusun aturan mekanisme untuk penyaluran dana bantuan melalui perbankan,
- Memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan,
- Menyusun analisis yang berkaitan dengan inklusi keuangan untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.

Pilar 5: Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Pilar ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dari lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensial yang ada di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan mencari beberapa alternatif yang dapat meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Pilar ini ditargetkan bagi lembaga keuangan, agar lembaga ini memperhatikan segmen potensial di masyarakat untuk menjadi nasabah lembaga keuangan. Beberapa aspek dari pilar ini adalah:

- Penggunaan fasilitas forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris,
- Peningkatan kerja sama di antara lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha,
- Investigasi dari berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa, dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

Pilar 6: Perlindungan Konsumen

Pilar ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai rasa aman dan terjamin dalam berhubungan dengan institusi keuangan ketika

memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan semua strategi yang diterapkan untuk membawa Indonesia menjadi negara ekonomi yang inklusif. Pilar ini meliputi beberapa komponen, yaitu: transparansi produk, penanganan keluhan nasabah, mediasi, dan edukasi konsumen

Pembangunan ekonomi inklusif adalah sangat penting agar dapat mengurangi kesenjangan perekonomian di Indonesia. Salah satu elemen untuk membawa Indonesia menjadi negara ekonomi inklusif adalah bank. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita dapat membantu melancarkan program pemerintah ini dengan cara menabung di bank. Keenam pilar tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program-program yang telah disesuaikan dengan kategori penduduk yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan kementerian terkait.

Untuk mempercepat pertumbuhan inklusi keuangan Indonesia, maka pemerintah menerbitkan Perpres 114 Tahun 2020 tentang SNKI (Sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusif) yang ditujukan kepada semua segmen masyarakat dengan fokus masyarakat berpendapatan rendah, dan masyarakat lintas kelompok serta pelaku UMKM. Melalui Perpres SNKI yang baru ini akan dapat mendorong penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan keuangan inklusi.

8. Kelompok Sasaran Inklusi Keuangan

Di Indonesia, kelompok masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapat akses keuangan antara lain kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Masyarakat berpenghasilan rendah (dalam hal ini MBR atau keluarga prasejahtera), pelaku UMKM, pekerja migran, wanita, disabilitas, anak terlantar, lansia, penduduk daerah tertinggal, serta pelajar dan pemuda. Strategi keuangan inklusif secara eksplisit membidik kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu:

- Tiga kategori penduduk, yang terdiri dari orang miskin berpendapatan rendah, miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin.

- Tiga lintas kategori yaitu pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Karakteristik Kelompok Sasaran

Sasaran Kapasitas Keuangan	Miskin Berpendapatan Rendah	Miskin Bekerja/ Miskin Produktif	Hampir Miskin
Kemampuan Menabung	Tidak memiliki kemampuan menabung sama sekali/memiliki kemampuan sangat kecil tanpa akses layanan tabungan	Memiliki kemampuan menabung sebagian dari pendapatan, tetapi kebanyakan menabung secara informal	Memiliki kemampuan menabung dan akses ke bank formal
Akses ke Kredit	Tidak dapat melunasi	Memiliki akses ke kredit informal. Mampu melunasi kredit, tetapi tidak memiliki jaminan	Memiliki akses ke sumber formal dan informal. Mampu melunasi kredit dan memiliki barang jaminan
Kebutuhan Asuransi	Sangat rentan terhadap guncangan (ekonomi) pribadi dan masyarakat	Memiliki beberapa penyangga, tetapi tetap bisa terpengaruh guncangan	Memiliki beberapa instrumen terhadap risiko
Kebutuhan Pengiriman Uang	Menerima remitansi dari anggota keluarga yang menjadi pekerja migran	Memerlukan remitansi serta kemungkinan pengiriman uang melalui ponsel	Melakukan pengiriman melalui bank, membayar tagihan, dan sebagainya
Melek Keuangan	Tidak ada	Sedang	Sedang
Identitas Keuangan	Tidak ada	Terbatas	Terbatas

Sumber: *Booklet Keuangan Inklusif 2014*

a. Kelompok Sasaran Miskin Berpendapatan Terendah

Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini diarahkan pada golongan sangat miskin

yang kemungkinan menerima bantuan sosial, serta segmen bawah yang termasuk kategori miskin yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

b. Kelompok Sasaran Miskin Bekerja/Miskin Produktif

Kelompok ini meliputi orang miskin yang berusaha sendiri. Yang termasuk dalam kategori ini adalah petani kecil dan marginal, nelayan, seniman dan pengrajin, pedagang kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal, baik di perkotaan dan perdesaan. Terbatasnya kemampuan mereka untuk memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan pendapatan akibat dari terbatasnya sumber daya yang mereka miliki.

c. Bukan Miskin

Semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja dapat dimasukkan dalam kategori ini.

- 1) Pekerja migran domestik dan internasional: kebanyakan buruh migran Indonesia adalah perempuan yang bermigrasi untuk bekerja di sektor informal. Sekitar 80% pekerja migran atau lazim disebut TKI. Biasanya mereka kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan. TKI umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di daerah perdesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses yang terbatas ke produk atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka selama proses tahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pascamigrasi). Mereka terutama membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal.
- 2) Perempuan: sering kali terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan di negara berkembang. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan

perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda. Sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut.

- 3) Penduduk daerah terpencil: terdapatnya kesenjangan akses ke jasa keuangan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sekitar 52% penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60% tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Hal ini menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti *mobile money* untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antarpulau, serta antarperdesaan dan perkotaan.

Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada sejumlah kelompok masyarakat yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal. Keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat.

9. Tantangan terhadap Pemenuhan Inklusi Keuangan

Terdapat sejumlah tantangan terhadap perwujudan keuangan inklusif di Indonesia. Menurut Arsana (2018) tantangan tersebut dapat dikategorikan menjadi empat area, yakni keterbatasan akses; minimnya penggunaan; kualitas yang rendah dan minimnya dukungan dari pelaku jasa keuangan:

a. Keterbatasan akses

Keterbatasan terhadap jasa keuangan sebagai suatu hambatan dalam peningkatan inklusi keuangan. Keterbatasan akses dapat disebabkan dari dua sisi yaitu permintaan (*demand side*) dan penawaran (*supply side*). Hambatan dari sisi permintaan meliputi: jauhnya lokasi bank, lamanya waktu antri di bank, banyaknya formalitas, dan

kurangnya kelengkapan dokumen. Hambatan dari sisi penawaran, seperti terbatasnya jumlah kantor cabang bank, layanan keuangan untuk masyarakat kecil dianggap bukan merupakan bisnis yang menguntungkan. Hambatan lainnya adalah tidak adanya produk yang sesuai untuk segmen nasabah tersebut merupakan keterbatasan yang sering kali dihadapi. Untuk mengatasi hal ini pemerintah mengadakan akses internet berkecepatan tinggi yang dapat diakses tanpa biaya di berbagai kota dan kabupaten, serta membangun jaringan internet serat optik untuk menghubungkan wilayah-wilayah tertinggal.

b. Minimnya penggunaan

Di Indonesia jumlah masyarakat yang menggunakan jasa keuangan saat ini masih rendah, yang bisa dilihat dari pertumbuhan rekening simpanan per tahun di Indonesia tak lebih dari 4,2%. Penduduk dewasa di Indonesia banyak yang belum memiliki rekening simpanan di lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya-upaya yang serius dari pemerintah.

c. Kualitas yang rendah

Kurangnya akses ke lembaga keuangan salah satunya dapat disebabkan karena rendahnya kualitas SDM dalam literasi keuangan. Literasi keuangan masyarakat Indonesia berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah, di mana pada tahun 2019 baru mencapai 38,03%, di mana tingkat literasi perempuan baru mencapai 36,13%, lebih rendah dibanding literasi laki-laki yang mencapai 39,94%. Selanjutnya penyebab lainnya kurangnya akses ke lembaga keuangan adalah karena rendahnya kualitas layanan perbankan, yang terlihat dari jumlah pengaduan masyarakat ke OJK yang terkait dengan layanan perbankan. Penyebab lainnya karena kualitas layanan perbankan, yang terlihat dari jumlah pengaduan masyarakat ke OJK yang terkait dengan layanan perbankan.

d. Minimnya dukungan dari pelaku jasa keuangan

Banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki rekening. Hanya 22% dari total UMKM yang memiliki akses kepada kredit perbankan,

sebagian besarnya berada di Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Sedangkan mereka yang berada di timur Indonesia, belum tersentuh akses perbankan secara menyeluruh (Candra, 2016).

Untuk mengatasi tantangan terhadap pemenuhan inklusi keuangan diperlukan kerangka regulasi dan institusi yang jelas, hal ini disebabkan karena percepatan inklusi keuangan di Indonesia masih banyak terhambat karena banyaknya aturan yang tumpang-tindih dan berbelit-belit, serta lemahnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi pemerintah.

Tabel 2.3 Penelitian yang Relevan

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	(Sarma & Pais, 2011)	“Financial Inclusion and Development”	Terdapat keterkaitan perkembangan SDM dengan inklusi keuangan
2.	(Khaki & Sangmi, 2012)	“Financial Inclusion in Jammu & Kashmir: A Study on Banker Initiatives”	Kemudahan akses ke sumber keuangan terkait pengentasan kemiskinan dan terjadinya kemajuan yang di negara bagian Jammu dan Kashmir melalui inklusi keuangan
3.	(Fatoki, 2014)	“The Financial Literacy of Micro Entrepreneurs in South Africa”	<i>The low of financial literacy by the owners of new micro enterprices</i>
4.	(Dahmen, 2014)	“Financial Literacy and the Success of Small Businesses: An Observation from a Small Business Development Center”	<i>A strong association between the small businesses’ financial strength and the business owners’ habits of mindwith regard to their financial statements</i>
5.	(Bhubanesh, 2016)	“Promoting Financial Inclusion in Nepal: Policy Assessment and Priorities”	Peningkatan inklusi keuangan di Nepal terkendala oleh rendahnya tingkat literasi keuangan, fasilitas infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya fasilitas berbasis teknologi

No.	Peneliti	Judul	Hasil
6.	(Aribawa, 2016)	“Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja dan Sustainable UMKM di Jawa Tengah”	Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan keberlanjutan UKM kreatif di Jawa Tengah
7.	(Kimmitt & Munoz, 2017)	“Entrepreneurship and Financial Inclusion through the Lens of Instrumental Freedoms”	<i>No single instrumental freedom is necessary for financial inclusion; it does not necessarily depend on the provision of microfinance and that political freedom is an important peripheral condition for inclusion</i>

Dummy

3

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *mixed method* yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara tingkat literasi keuangan dengan inklusi keuangan dari pelaku UMKM kerajinan sulaman. Selanjutnya penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi konfirmatori (*confirmatory study*). Desain penelitian meliputi tujuan, unit analisis, dan jenis data dengan menggunakan metode survei. Hasil penelitian dapat digeneralisasi dengan lebih baik jika menggunakan metode survei (Kerlinger & Lee, 2000).

B. Objek Penelitian

Yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada UMKM kerajinan sulaman

benang emas yang ada di Kecamatan Pariaman Utara yang berjumlah 318 UMKM, yang tersebar di 15 desa/kelurahan. Namun, sampel yang dipilih adalah responden yang berada di sentra kerajinan sulaman benang emas yang terdapat di 4 desa, yaitu Desa Naras I (95 UMKM), Desa Manggung (43 UMKM), Desa Naras Hilir (45 UMKM), dan Desa Balai Naras (39 UMKM). Pemilihan lokasi penelitian adalah karena keempat desa tersebut merupakan sentra sulaman benang emas dengan jumlah UMKM kerajinan sulaman benang emas yang terbanyak, sehingga diharapkan jika meneliti di sentra UMKM sulaman, maka tujuan dari penelitian akan tercapai. Untuk responden penelitian, kami menggunakan metode *purposive sampling*, yang dipilih berdasarkan sejumlah alasan akademis (*academic explanation*) yang memadai (Bryman, 2014), dengan kriteria UMKM kerajinan sulaman yang bersedia untuk diwawancarai, dan sudah beroperasi lebih dari 2 tahun. Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh sampel sebanyak 177 UMKM sulaman benang emas.

C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang akan dilaksanakan dapat diilustrasikan dalam alur sebagai berikut.

1. Observasi pertama
Mengumpulkan informasi dan data-data tentang jenis-jenis UMKM kerajinan sulaman yang ada di Sumatra Barat. Data observasi awal ini tidak hanya berisi kegiatan saja, tetapi juga deskripsi dari kegiatan UMKM kerajinan.
2. *Clustering*
Mengelompokkan UMKM kerajinan dalam beberapa klaster yang memiliki karakteristik sama sehingga memiliki permasalahan dan tantangan yang relatif sama. Selanjutnya mengelompokkan produk-produk sulaman terbaik di Sumatra Barat.
3. Evaluasi Klaster
Mengevaluasi masing-masing klaster dengan menggunakan wawancara dan *depth interview* dengan pihak-pihak yang terlibat.
4. Survei
Melakukan survei pada UMKM kerajinan terbaik untuk mengetahui tingkat literasi keuangan serta tingkat inklusi keuangan para

pengelola UMKM kerajinan, dengan menggunakan kuesioner dan wawancara dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan *purposive sampling*.

5. Pengolahan Data Observasi Awal

Data observasi pertama diolah agar mendapatkan karakteristik dari pengelola usaha agar bisa dikelompokkan berdasarkan kesamaan tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan, serta menguji keterkaitan literasi keuangan dengan inklusi keuangan.

6. Analisis Data

Melakukan analisis SWOT, yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner agar mendapatkan informasi yang jelas dari responden dan wawancara serta *depth interview* dengan pihak-pihak yang terlibat untuk menemukan permasalahan dan kendala dari secara langsung, dan juga melakukan FGD dengan kepada pemilik UMKM, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya.

7. Penentuan Model Inklusi Keuangan

Berdasarkan tingkat literasi keuangan masing-masing kluster, inklusi keuangan, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat akses keuangan, serta hasil wawancara dengan masing-masing kluster dan lembaga-lembaga keuangan maka dapat dibuat model inklusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM kerajinan sulaman di Sumatera Barat.

D. Sumber Data

Sumber data berasal dari pelaku usaha kerajinan sulaman di Sumatera Barat, serta dari lembaga keuangan bank maupun nonbank yang berada di Kota Padang, Pariaman, Agam, dan Bukit Tinggi, yaitu BRI, BPD, BNI, BSM, BTN, BPR, Koperasi, dan juga dari legislatif daerah menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pertama pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan kuesioner (angket) kepada pelaku UMKM kerajinan sulaman dan sulaman. Pada tahap selanjutnya

adalah melakukan wawancara dan *Focus Discussion Group* (FGD) dengan beberapa narasumber (informan) yang berasal dari lembaga pemerintah, lembaga perbankan, koperasi, dan dari pelaku UMKM di Sumatra Barat.

F. Teknik Analisis Data

Pada tahap pertama teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, dan untuk menguji hipotesis digunakan SEM-PLS. *Partial Least Square* (PLS) yang merupakan metode analisis yang *powerful* karena dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar. PLS selain dapat digunakan sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengujian proposisi (Ghozali, 2008).

Pada tahap selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan analisis SWOT dan matriks internal-eksternal, dengan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD), antara pihak pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, koperasi, maupun pihak UMKM, melalui FGD ini dapat dilakukan analisis dari dua sisi, yaitu dari sisi penawaran (*supply side*) dan permintaan (*demand side*). Membahas kendala-kendala yang ditemui dalam peningkatan inklusi keuangan UMKM kerajinan sulaman di perdesaan serta solusi yang diharapkan, baik dari sisi permintaan (*demand side*), yaitu pihak pelaku UMKM, maupun dari sisi penawaran (*supply side*), yaitu pihak pemerintah, pemerintah daerah, koperasi maupun lembaga keuangan bank maupun nonbank.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan terhadap suatu variabel yang digunakan sebagai landasan dalam merumuskan kisi-kisi instrumen. Definisi operasional variabel dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Aspek Demografi	Gambaran yang berhubungan dengan pengelola usaha kerajinan	<ul style="list-style-type: none">- Pendidikan- Usia pengelola- Pengalaman pengelola- Lama usaha
Literasi Keuangan	Kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan menggunakan informasi yang terkait dengan keputusan keuangan pada perusahaan	<ul style="list-style-type: none">- <i>Basic personal finance</i>- <i>Money management credit and debt</i>- <i>Management saving and investment</i>- <i>Risk management</i>
Inklusi Keuangan	Upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Akses (<i>access</i>),- Penggunaan (<i>usage</i>)- Kualitas (<i>quality</i>) layanan lembaga keuangan
Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Lembaga formal- Lembaga semi-formal- Sumber-sumber informal

Dummy

4

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek

Salah satu produk kerajinan sulaman terbaik di Sumatra Barat terdapat di Kota Pariaman. Kota Pariaman terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Utara dengan kota Kecamatan Nareh, Kecamatan Pariaman Tengah dengan kota Kecamatan Pariaman, dan Kecamatan Pariaman Selatan dengan kota Kecamatan Kuraitaji. Kecamatan Pariaman Utara tercatat memiliki wilayah paling luas, dan memiliki keunggulan tersendiri dalam bidang ekonomi, khususnya industri rumah tangga, yang terkenal dengan sulaman benang emas. Sulaman benang emas terkenal karena motif-motifnya yang umumnya natural dan berasal dari alam, seperti motif kaluak paku, kembang saloyang, garis-garis dan lingkaran motif-motif ini memiliki falsafah dan makna tersendiri bagi masyarakat. Sulaman ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sudah banyak sulaman ini dipasarkan di berbagai daerah di Sumatra Barat dan juga sampai ke Malaysia.

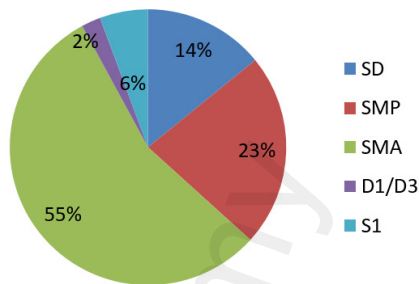
Sentra kerajinan sulaman benang emas kebanyakan ini berasal dari berbagai desa di Kecamatan Pariaman Utara, seperti Desa Naras I, Desa Naras Hilir, Desa Manggung, dan Desa Balai Naras (Koperindagkop, 2017). Kerajinan sulaman ini sangat diminati oleh orang Sumatra Barat hingga ke mancanegara. Kerajinan sulaman Naras ini sudah diwarisi sejak zaman nenek moyang. Pengusaha kerajinan sulaman Naras

ini adalah perempuan yang berasal asli dari Desa Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, namun pengrajannya sebagian besar berasal dari desa yang berbeda-beda di Kecamatan Pariaman Utara.

B. Analisis Profil Responden

1. Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.

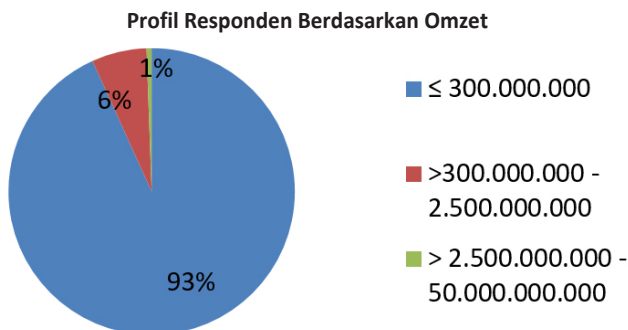


Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas terlihat bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah pada tingkatan SLTA, dengan persentase sebesar 55%. Selanjutnya diikuti oleh tingkat pendidikan SMP sebesar 23%, tingkat pendidikan SD 14%, tingkat pendidikan S-1 6%, tingkat pendidikan diploma sebesar 2%.

2. Berdasarkan Omzet

Karakteristik responden berdasarkan omzet usaha kerajinan sulaman pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut.

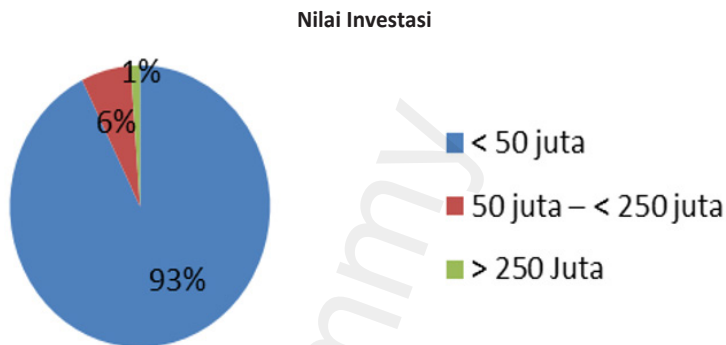


Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas terlihat bahwa sebagian besar omzet responden adalah di bawah Rp300 juta, dengan persentase sebesar 93%. Selanjutnya diikuti oleh omzet penjualan antara Rp300 juta–Rp2.500 juta sebesar 6%, dan hanya sebanyak 1% responden yang omzetnya di atas Rp2.500 juta.

3. Nilai Investasi

Berdasarkan nilai investasi, maka gambaran nilai investasi pengusaha kerajinan sulaman yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut.

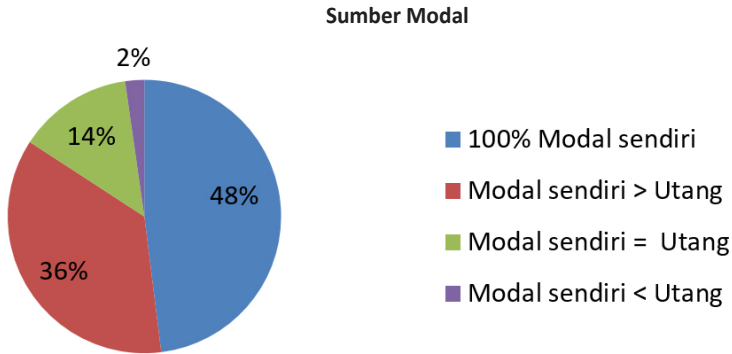


Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Nilai Investasi

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas terlihat bahwa sebagian besar nilai investasi awal usaha kerajinan sulaman berjumlah di bawah Rp50 juta (79%), dan hanya sebagian kecil pengusaha yang memiliki modal usaha di atas Rp250 juta (1%). Hal ini menunjukkan masih rendahnya modal usaha yang dimiliki usaha kerajinan sulaman di Kota Padang.

4. Sumber Modal

Karakteristik responden berdasarkan dari mana sumber modal yang digunakan pada usaha kerajinan dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut.



Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Modal

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas terlihat bahwa sebagian besar sumber modal usaha kerajinan sulaman benang emas berasal dari modal sendiri dengan sedikit utang (48%), dan hanya sebesar 2% pengusaha kerajinan yang menggunakan utang lebih besar dari modal sendiri. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat inklusi keuangan dari pelaku usaha kerajinan sulaman.

5. Penggunaan Produk dan Jasa Keuangan

Penggunaan jasa keuangan yang digunakan oleh UMKM sulaman benang emas dapat dilihat dari produk dan jasa keuangan perbankan yang digunakan. Produk dan jasa keuangan yang digunakan oleh UMKM sulaman pada beberapa desa di Kecamatan Pariaman Utara dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut.



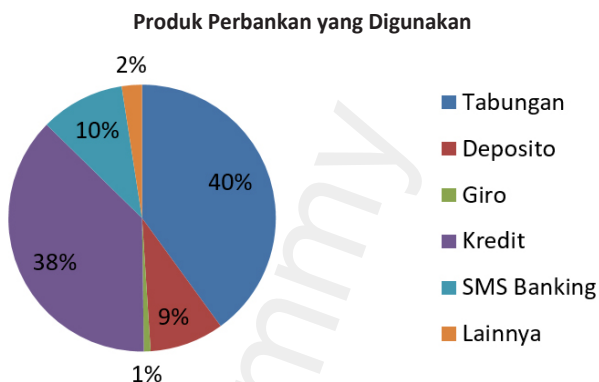
Gambar 4.5 Penggunaan Produk dan Jasa Keuangan

Berdasarkan Gambar 4.5 terlihat hanya 52% UMKM sulaman pada beberapa desa di Kecamatan Pariaman Utara yang berlokasi di desa

Kecamatan Pariaman Utara, seperti Desa Naras I, Desa Manggung, Desa Naras Hilir, dan Desa Balai Naras yang menggunakan jasa keuangan untuk pembiayaan.

6. Produk Keuangan Perbankan yang Digunakan

Produk perbankan yang digunakan oleh UMKM sulaman di Kecamatan Pariaman Utara yang berlokasi di desa Kecamatan Pariaman Utara, seperti Desa Naras I, Desa Manggung, Desa Naras Hilir, dan Desa Balai Naras yang menggunakan produk yang disediakan jasa keuangan dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut.



Gambar 4.6 Produk Perbankan yang Digunakan

Dari Gambar 4.6 di atas terlihat bahwa produk perbankan yang paling banyak digunakan responden adalah produk tabungan (40%) dan kredit (38%).

C. Deskripsi Variabel Penelitian

Pada tahapan ini dilakukan pengolahan data untuk mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan proporsi jawaban responden terhadap penelitian, yang dapat diketahui dari nilai Tingkat Capaian Responden (TCR) dari setiap variabel penelitian, adalah sebagai berikut.

1. Literasi Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan pelaku UMKM kerajinan sulaman berdasarkan variabel *money management*,

credit & debt, saving & investment, dan risk management, dapat diketahui dari nilai tingkat capaian responden (mean) dari setiap variabel penelitian, adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Literasi Keuangan

No.	Literasi Keuangan	Mean	Percent	Description
1.	<i>Money Management</i>	3,45	69,0	<i>Sufficient literate</i>
2.	<i>Credit & Debt Management</i>	3,13	62,6	<i>Sufficient literate</i>
3.	<i>Saving and Investment</i>	2,82	56,4	<i>Less literate</i>
4.	<i>Risk Management</i>	3,01	60,0	<i>Sufficient literate</i>
Rata-rata		3,10	62,0	<i>Sufficient literate</i>

Dari Tabel 4.1 di atas terlihat bahwa kemampuan mengelola keuangan, mengelola pinjaman, dan manajemen risiko berada kategori cukup, sedangkan kemampuan mengelola tabungan dan investasi masih kurang. Secara keseluruhan literasi keuangan pengusaha kerajinan berada pada kategori cukup atau *sufficient literate*, di mana pelaku usaha kerajinan hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan dengan skor rata-rata sebesar 3,10. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kerajinan pelaku usaha kerajinan sulaman hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan, namun belum memahami tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

2. Inklusi Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM kerajinan sulaman kerajinan sulaman terhadap inklusi keuangan berdasarkan *access, usage, quality, dan welfare*, dapat diketahui dari nilai tingkat capaian responden (*mean*) dari setiap variabel penelitian, adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Inklusi Keuangan

No.	Variabel Inklusi Keuangan	Mean	Percent	Description
1.	Access	3,18	63,6	Cukup
2.	Usage	2,96	59,2	Kurang
3.	Quality	3,03	60,1	Cukup
4.	Welfare	3,08	61,6	Cukup
Rata-rata		3,06	61,2	Cukup

Dari Tabel 4.2 di atas terlihat bahwa rata-rata persepsi responden terhadap kebijakan inklusi keuangan berada pada kategori cukup, dengan penggunaan lembaga keuangan dalam kategori kurang baik. Terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi UKM untuk menggunakan layanan perbankan.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat untuk mengakses jasa perbankan adalah: 1) biaya bunga tinggi, 2) kurang pengetahuan tentang produk perbankan, 3) keyakinan bahwa bunga adalah riba, 4) karena banyak prosedur, 5) tidak memiliki laporan keuangan, 6) kurang pengalaman, 7) kurang paham teknologi, 8) tidak punya dokumen legal, 9) tidak paham memanfaatkan *handphone* untuk mengakses layanan perbankan, dan 10) tidak paham dengan layanan-layanan perbankan.

D. Keterkaitan Literasi Keuangan dengan Inklusi Keuangan

Untuk menguji keterkaitan literasi keuangan pelaku usaha dengan tingkat inklusi keuangan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan program *smart PLS 3.0*. Berikut *structural model* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Nilai R^2 sebesar 0,71 mengindikasikan pengaruh variabel eksogen (literasi keuangan) terhadap variabel endogen (inklusi keuangan) termasuk dalam kategori baik (Ghozali, 2014). Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (G20, 2012), yang menyatakan bahwa literasi keuangan mampu mendorong akses ke

lembaga keuangan atau finansial inklusif. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan inklusi keuangan sangat diperlukan peningkatan literasi keuangan dengan melakukan peningkatan pengetahuan yang terkait dengan:

1. Pengelolaan keuangan, yang meliputi aktivitas dalam membuat perencanaan keuangan, membuat penganggaran, pengambilan keputusan keuangan, penerapan, serta evaluasi keuangan.
2. Manajemen kredit, yaitu mengatur dan mengelola kredit yang dimiliki agar digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan awal melakukan kredit dimulai sejak kredit tersebut diajukan hingga kredit tersebut dinyatakan lunas.
3. Manajemen tabungan dan investasi. Pengelolaan tabungan dengan tujuan kemudahan akses likuiditas, perencanaan keuangan dan keamanan, selanjutnya pengelolaan investasi dengan melakukan penanaman modal untuk memperoleh keuntungan.
4. Manajemen risiko, merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko, yang bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir risiko-risiko yang timbul. Di samping itu, peningkatan inklusi keuangan juga dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya-upaya yang dapat mengatasi UMKM kerajinan dalam memanfaatkan jasa-jasa dari lembaga keuangan.

5

MODEL INKLUSI KEUANGAN

Untuk merumuskan model inklusi keuangan pada UMKM kerajinan sulaman maka terdapat beberapa tahap yang dilakukan. *Tahap pertama*, mengidentifikasi lembaga keuangan bank maupun nonbank yang sudah masuk ke Pariaman dan menyiapkan pedoman wawancara. *Tahap kedua*, melakukan FGD dengan lembaga keuangan bank dan nonbank, lembaga pemerintah dan Perindagkop, pengelola pasar, dan forum pengusaha kerajinan sulaman. *Tahap ketiga*, melakukan analisis SWOT, analisis lingkungan internal (IFAS) dan eksternal (EFAS) UMKM dengan melakukan analisis matriks SWOT. *Tahap keempat*, merancang model inklusi keuangan. Uraian masing-masing tahap adalah sebagai berikut.

A. Identifikasi Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank

Lembaga keuangan bank maupun nonbank yang sudah masuk di Kecamatan Pariaman Utara antara lain BRI, BPD, BNI, BSM, BTN, BPR, dan Koperasi. Lembaga keuangan terdekat untuk pengusaha sulaman sendiri ada di Kecamatan Pariaman Utara yaitu bank BPD, BRI, BNI dan BMT Syariah. Bank-bank tersebut dianggap sudah merakyat dan mudah untuk pengaksesannya. Selain itu, terdapat pula koperasi yang dimodali oleh LSM.

Lembaga keuangan seperti bank konvensional baru masuk dan berperan dalam proses pembayaran transfer dan penyimpanan. Namun, ada juga responden yang sudah mengakses beberapa bank lainnya seperti BRI, Bank Nagari, BNI, dan Bank Mandiri, mereka adalah pengusaha yang usahanya sudah cukup besar dengan jangkauan pemasaran yang sudah sangat luas. Mereka memilih mempunyai banyak rekening di banyak bank demi kemudahan pelanggan yang bertransaksi. Sedangkan untuk permodalan, hanya sebagian kecil pengusaha yang mengaksesnya. Hal tersebut terganjal oleh masalah keberlanjutan pendampingan dari bank itu sendiri dan masalah tingkat bunga yang tinggi. Sehingga mereka merasa kesulitan pada saat pembayaran utang tersebut, selain itu, mereka juga merasa kurang nyaman dalam berusaha.

Pengusaha yang mengakses kredit ke perbankan adalah mereka yang sudah memiliki mitra di dalam bank tersebut. Sehingga rasa kepercayaan antara bank dengan pengusaha sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, pengusaha tersebut juga hanya meminjam dalam jumlah kecil saja, sebagian modalnya masih menggunakan modal sendiri. Namun, karena kemitraan yang sudah dekat, pihak bank mau memfasilitasi perkembangan usaha tersebut. Selain itu, ada pula yang mendapat pendampingan dari Bank Indonesia yaitu pengusaha “Sulaman Mayang”, Ibu Fitrinawati. Di samping itu, ada bantuan dana yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Telkom, PT Semen, dan Jasa Raharja kepada UMKM sulaman di desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Utara.

Dalam bidang pemasaran, sebenarnya terdapat pula lembaga keuangan berupa bank konvensional yang bisa memfasilitasi. Bank tersebut merupakan BNI cabang Pariaman. Namun, sampai saat ini, bank tersebut tidak memberikan fasilitas tersebut pada pengusaha sulaman di desa Kecamatan Pariaman Utara. Sehingga pengusaha sulaman pun tidak dapat merasakan fasilitas tersebut.

B. Melakukan *Focus Group Discussion*

Untuk mengeksplorasi lebih dalam akan dilakukan wawancara tertulis dan *Focus Group Discussion* (FGD), antara pihak pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, koperasi, maupun pihak UMKM, melalui FGD ini dapat dilakukan analisis dari dua sisi, yaitu dari sisi penawaran (*supply*

side) dan permintaan (*demand side*). Membahas kendala-kendala yang ditemui dalam peningkatan inklusi keuangan UMKM kerajinan sulaman di perdesaan serta solusi yang diharapkan, baik dari sisi permintaan (*demand side*), yaitu pihak pelaku UMKM, maupun dari sisi penawaran (*supply side*), yaitu pihak pemerintah, pemerintah daerah, koperasi maupun lembaga keuangan bank maupun nonbank.

Efektivitas penerapan inklusi keuangan terhadap UMKM kerajinan sulaman/sulaman di perdesaan Sumatra Barat dapat dilihat dari hasil wawancara dan FGD dengan beberapa narasumber (informan) yang berasal dari lembaga pemerintah, lembaga perbankan, koperasi, dan dari pelaku UMKM. Data tentang efektivitas penerapan inklusi keuangan, yang terkait dengan: bentuk bantuan dana dan hambatan dalam penerapan inklusi keuangan, kendala dalam pengembangan inklusi keuangan, dan harapan untuk pengembangan inklusi keuangan UMKM kerajinan sulaman/sulaman di perdesaan diperoleh melalui wawancara dan FGD dengan informan: dari lembaga keuangan (BRI, BNI, Bank Nagari, BI), dari pemerintah (Badan Legislatif, Dinas Perindag Sumbar, Perindagkop Pariaman), Koperasi UMKM, dan Ketua UMKM Sumbar, yang menunjukkan hasil sebagai berikut.

Informan Pertama: Badan Legislatif (DPR)

- a. Terkait dengan bentuk bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM kerajinan adalah:
 - DPR Provinsi memberikan bantuan dana yang dititipkan ke dinas Koperasi UMKM, untuk mengadakan pelatihan kepada pelaku-pelaku UMKM untuk mendidik pelaku UMKM percaya diri.
 - DPR siap menitipkan anggaran untuk membangun UMKM di Sumatra Barat, dan siap menyalurkan dana.
 - Siap membantu dan menyediakan anggaran untuk pengembangan UMKM.
- b. Terkait dengan kendala yang ditemui dalam penyaluran dana dari pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga keuangan adalah:
 - Banyak kepala-kepala dinas koperasi dan UKM kurang peduli dengan perkembangan UMKM.
 - Harga jual hasil kerajinan selalu ditekan.

- Pelaku UMKM kerajinan kurang kreatif, pengrajin di pedalaman hanya menunggu kapan si pemilik galeri datang dan membeli dengan harga murah.
- c. Terkait dengan harapan untuk peningkatan inklusi keuangan UMKM kerajinan sulaman di perdesaan adalah:
- Menghidupkan UMKM dengan sistem gugus, yaitu UMKM sulaman yang sudah besar dan punya galeri membantu UMKM sulaman yang masih kecil dengan menjadikan anak angkat.
 - Usaha kerajinan dijadikan anak angkat oleh lembaga-lembaga keuangan.
 - Perlu peningkatan kemampuan manajemen dan kemampuan *fintech*.

Informan Kedua: Ketua Forum UMKM, dan Ketua Harian UMKM Sumbar

- Terkait dengan bentuk bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM kerajinan adalah bantuan dana dan bantuan teknis. Bentuk bantuan dana dan bantuan teknis yang diberikan selama ini kurang tepat, belum terkait dengan pengembangan UMKM, seperti masalah SDM, masalah produk, kualitas, harga, dan pemasaran.
 - Bantuan dana kurang mencapai sasaran, modal utama yang harus diberikan yakin dan semangat.
 - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak dipimpin orang yang berjiwa bisnis atau berjiwa *entrepreneurship*, sehingga pola bantuan yang diberikan untuk pengembangan UMKM di perdesaan belum mencapai sasaran.
- a. Terkait dengan kendala yang ditemui dalam penyaluran dana dari pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga keuangan adalah:
- Bantuan dana belum mencapai sasaran, hal ini terkait dengan *mindset* dan pola pikir pelaku UMKM di perdesaan yang belum mampu membaca peluang pasar.
 - Prosedur bank rumit. Bantuan KUR banyak disediakan bank, tetapi di lapangan UMKM belum mampu mendapatkannya, belum maju sudah pulang, karena pinjaman pakai jaminan.

- Bantuan dan pembinaan yang diberikan kurang optimal, terlihat masih kurangnya motivasi dan kreativitas pelaku UMKM sulaman dalam mengembangkan produk.
 - Bantuan yang diperlukan dalam bentuk pengembangan SDM, pengembangan produk, dan pemasaran dengan sistem gugus, yang besar mengayomi yang kecil, dijadikan anak angkatnya.
 - Bantuan dalam bentuk pengembangan produk yang diterima UMKM belum bisa diterapkan, baik dari segi kualitas, kemasan, maupun dalam penetapan harga.
 - Bank belum melakukan pembinaan secara menyeluruh dan berklaster, mulai dari bawah sampai UMKM naik kelas.
- b. Terkait dengan harapan untuk peningkatan inklusi keuangan UMKM kerajinan sulaman di perdesaan adalah:
- Perlunya bantuan pembinaan dalam bentuk: pembinaan SDM untuk mengubah *mindset* pelaku UMKM, dalam bentuk pengembangan produk, yang terkait dengan kualitas, kemasan, dan penetapan harga jual.
 - Mendorong tumbuhnya UMKM, bagaimana membuka kreativitas UMKM untuk membaca peluang pasar.
 - Bukan pemasaran UMKM yang masalah, selama ini pembinaan telah banyak dilakukan, tetapi kurang tepat. SKPD seharusnya dipimpin orang yang berjiwa bisnis, minimal didampingi oleh *entrepreneur*, sehingga dia bisa tahu mengapa produk kurang laku terjual.
 - Pembinaan dari bank seharusnya menyeluruh, dan berklaster, menggunakan sistem gugus.
 - Perlunya pelatihan motivasi dari *entrepreneur* yang sukses untuk meningkatkan motivasi, keyakinan dan semangat serta kemampuan komunikasi dari pelaku UMKM di perdesaan.
 - Bank hanya pebisnis, antara pebisnis harus saling bersinergi. Produk yang diberikan ke UMKM seharusnya juga diikuti pembinaan kepada UMKM. Menyeluruh dan berklaster.
 - Perlu perda bela-beli untuk Sumbar. Untuk beli produk UMKM, seperti souvenir untuk tamu hotel, dengan harga UMKM.

Informan Ketiga: Kepala Dinas Perindagkop Kota Pariaman dan Dinas Perindag Provinsi

- a. Terkait dengan bentuk bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM kerajinan adalah:
 - Bentuk bantuan untuk UMKM yang diterima adalah dalam bentuk bantuan keuangan dan bantuan teknis. Dalam bentuk bantuan keuangan di mana Dinas Perindagkop memfasilitasi kerja sama kemitraan antara pelaku UMKM dengan BUMN dan BUMD, dan perbankan berupa dana CSR (Semen Padang), PKBL (Telkom, Jasa Raharja), dan KUR (Bank Nagari dan BRI), serta fasilitas wirausaha pemula. Selanjutnya bantuan teknis adalah berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana seperti: etalase, mesin jahit, serta sarana untuk berjualan, serta beberapa pelatihan yang diberikan kepada UMKM sulaman di perdesaan seperti pelatihan manajemen keuangan, pemasaran, dan beberapa keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM.
- b. Terkait dengan kendala yang ditemui dalam penyaluran dana dari pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga keuangan adalah:
 - Regulasi yang ada selama ini belum mempermudah UMKM dalam mendapatkan bantuan, seperti adanya batasan usia dalam pemberian bantuan, dan adanya syarat-syarat yang mengikat dalam penyaluran bantuan.
 - Penggunaan dana yang disalurkan sering kali tidak sesuai dengan proposal yang diajukan, hal ini terkendala dengan masalah pengawasan dalam *me-monitoring* penggunaan dana tersebut.
- c. Terkait dengan harapan untuk peningkatan inklusi keuangan UMKM kerajinan sulaman di perdesaan adalah:
 - Untuk meningkatkan inklusi keuangan dalam memberdayakan UMKM di perdesaan perlunya meningkatkan wawasan, motivasi, kreativitas dan keterampilan kepada pelaku UMKM dalam mengelola usaha, dalam bidang manajemen keuangan dan pemasaran, serta meningkatkan keterampilan di bidang teknologi.

- Untuk meningkatkan inklusi keuangan dalam memberdayakan UMKM di perdesaan juga diperlukan regulasi untuk penyaluran bantuan yang tidak menyulitkan, sehingga mempermudah untuk menjangkau pelaku usaha mikro.

Informan Kelima: Lembaga-lembaga Keuangan dari BRI, BNI, Bank Nagari

- Terkait dengan bentuk bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM kerajinan adalah:
 - Perbankan tetap ekspansi untuk mengembangkan sektor UMKM, seperti BRI sudah menyalurkan KUR sebesar 100 triliun.
 - BRI memiliki 14.000 kantor cabang dan agen Brilink.
 - Menyediakan bantuan kredit mikro, KUR.
 - Perbankan sudah melakukan pembinaan kepada UMKM, mulai dari yang kecil sampai yang besar.
 - Melakukan restrukturisasi kredit.
 - Diikuti pameran.
 - Mengefektifkan web pasar, pemasaran secara *online*.
- Terkait dengan kendala yang ditemui dalam penyaluran dana dari pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga keuangan adalah:
 - Kendala data.
 - Untuk meningkatkan inklusi keuangan, dari sisi lembaga keuangan perlu tiga indikator, yaitu: 1) dana, 2) infrastruktur, dan 3) data.
 - Produk yang ada belum mampu terjual, sehingga kesulitan membayar pinjaman.
- Terkait dengan harapan untuk peningkatan inklusi keuangan UMKM kerajinan sulaman di perdesaan adalah:
 - UMKM yang ada harus mengikuti selera pasar, seperti jempuit bola.
 - Untuk meningkatkan inklusi keuangan, dari sisi lembaga keuangan perlu tiga indikator, yaitu: 1) uang, 2) infrastruktur, dan 3) data.

- Perlu sinergi antara perbankan dengan dinas terkait, pengelola pasar, kelompok-kelompok klaster usaha, dan pelaku usaha yang bergerak secara tersistem.

Selanjutnya menentukan model inklusi keuangan maka sebelumnya perlu dilakukan analisis *Strength, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT), dengan terlebih dahulu dilakukan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan internal-eksternal.

Analisis SWOT dilakukan untuk UMKM kerajinan sulaman agar membuat mereka mengerti kelemahan mereka, dan membuat mereka menggunakan kekuatan mereka untuk dapat bertahan di pasar dan membuat keuntungan yang normal (Gupta, 2013). Analisis SWOT mengkaji fenomena secara kualitatif tentang faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman penerapan inklusi keuangan pada UMKM sulaman benang emas di desa/kelurahan Kecamatan Pariaman Utara. Sebelum melakukan analisis SWOT, terlebih dahulu dilakukan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal penerapan inklusi keuangan. Faktor internal yaitu dengan mendata kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal yaitu dengan mendata peluang dan ancaman.

C. Analisis Lingkungan Internal (IFAS) UMKM Kerajinan Sulaman

Analisis lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel kekuatan dan kelemahan inklusi keuangan pada UMKM sulaman benang emas di desa: Naras I, Naras Hilir, Manggung, dan Balai Naras di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Sumatra Barat. Hasil wawancara dan pengisian pertanyaan untuk mengevaluasi serta menempatkan faktor internal dengan tepat sesuai permasalahan ada pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 *Internal Factor Analysis Summary (IFAS) Matriks Inklusi Keuangan pada UMKM Kerajinan Sulaman/Sulaman Berbasis Perdesaan di Kecamatan Pariaman Utara*

No.	<i>Strengths (Kekuatan)</i>	Bobot	Rating	Nilai
1.	Ketersediaan lembaga keuangan, baik bank dan nonbank	0,10	3,82	0,382
2.	Kemudahan akses ke lembaga keuangan dan kemudahan sistem pembayaran	0,10	3,25	0,325
3.	Keberagaman produk yang ditawarkan lembaga keuangan	0,09	3,02	0,272
4.	SDM memiliki <i>skill</i> dan usaha kerajinan sulaman tradisional secara turun-temurun	0,09	3,02	0,272
5.	Ketersediaan ATM	0,09	3,00	0,270
6.	Ketersediaan jaringan internet/layanan <i>mobile banking</i>	0,08	2,52	0,202
SUBTOTAL		0,55		1,723
No.	<i>Weaknesses (Kelemahan)</i>	Bobot	Rating	Nilai
1.	Rendahnya pendidikan dan pengetahuan SDM seputar akses perbankan	0,09	3,12	0,281
2.	Bunga kredit masih dianggap tinggi	0,08	3,24	0,259
3.	Syarat administratif masih dianggap rumit dan menyulitkan pengusaha	0,08	3,20	0,256
4.	Rendahnya pendapatan pengusaha kerajinan sulaman/sulaman	0,08	3,36	0,269
5.	Kurangnya pelatihan dan pendampingan usaha	0,07	2,02	0,141
6.	Kurangnya koordinasi dari gabungan pengusaha UMKM kerajinan sulaman	0,06	1,64	0,098
SUB TOTAL		0,45		1,304
TOTAL		1,00	Rata-rata 2,82	3,027

Keterangan:

Pemberian *rating*:

4 = Kekuatan yang besar

3 = Kekuatan yang sedang

2 = Kelemahan yang kecil

1 = Memiliki kelemahan yang besar

Berdasarkan Tabel 5.1 hasil matriks IFAS menunjukkan skor nilai inklusi keuangan pada UMKM kerajinan sulaman/sulaman sebesar 3,027 di atas nilai rata-ratanya sebesar 2,82 dari keseluruhan faktor internalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai *strengths* (kekuatan) lebih besar dibandingkan dengan *weaknesses* (kelemahan), yaitu dengan skor nilai sebesar 1,723 lebih besar dibanding 1,304 .

D. Analisis Lingkungan Eksternal (EFAS) UMKM Kerajinan Sulaman

Tabel 5.2 *External Factor Analysis Summary (EFAS) Matriks Inklusi Keuangan pada UMKM Kerajinan Sulaman/Sulaman Berbasis Perdesaan di Kecamatan Pariaman Utara*

No.	<i>Opportunities</i>	Bobot	Rating	Nilai
1.	Bantuan permodalan dari Kementerian koperasi, dan lembaga keuangan formal	0,09	3,72	0,335
2.	Program pemerintah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan bagi UMKM sulaman	0,09	3,54	0,319
3.	Bantuan CSR dari perusahaan	0,09	3,12	0,281
4.	Perluasan pasar melalui pemanfaatan teknologi internet (<i>fintech</i>)	0,09	3,08	0,277
5.	Keikutsertaan dalam pameran	0,08	3,02	0,242
6.	Ketersediaan layanan keuangan tanpa kantor/program laku pandai	0,08	3,00	0,240
SUBTOTAL		0,52		1,694
No.	<i>Threats (Ancaman)</i>	Bobot	Rating	Nilai
1.	Keengganan pengrajin mengakses lembaga keuangan karena bunga yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi UMKM sulaman	0,09	3,26	0,293
2.	Skedul pembayaran tidak fleksibel	0,09	3,03	0,273
3.	Rendahnya tingkat literasi keuangan pengusaha	0,08	2,52	0,202
4.	Isu riba	0,08	2,03	0,162
5.	Keraguan akan keamanan bertransaksi <i>online</i> (<i>cybercrime</i>)	0,07	1,56	0,109
6.	Perekonomian desa menurun	0,07	1,63	0,114
SUBTOTAL		0,48		1,153
TOTAL			Rata-rata 2,79	2,847

Keterangan:

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Peluang yang besar
- 3 = Peluang yang kecil
- 2 = Ancaman yang kecil
- 1 = Ancaman yang besar

Berdasarkan Tabel 5.2 hasil matriks EFAS menunjukkan skor nilai inklusi keuangan pada UMKM sulaman sebesar 2.847 di atas nilai rata-ratanya sebesar 2,79 dari keseluruhan faktor internalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai *opportunities* (peluang) lebih besar dibandingkan dengan *threats* (ancaman), yaitu dengan skor nilai sebesar 1,694 lebih besar dibanding 1,153.

E. Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT)

Identifikasi faktor internal, kekuatannya (*strengths*) adalah promosi lembaga keuangan, baik bank dan nonbank sudah banyak yang masuk dan banyak menawarkan produknya, dan sudah diaksesnya lembaga keuangan yaitu bank untuk mempermudah sistem pembayaran pengusaha UMKM. Adapun kelemahannya (*weakness*) adalah: (a) bunga kredit masih dianggap tinggi oleh pengusaha UMKM sulaman, (b) syarat administratif masih dianggap rumit dan belum memudahkan pengusaha, lembaga keuangan, yaitu bank masih belum menjadi andalan dalam pemenuhan modal pengusaha kerajinan sulaman/sulaman. Pengusaha lebih memilih melanjutkan produksi untuk mendapatkan penghasilan yang dapat dijadikan modal berputar, (c) rendahnya tingkat pendidikan pengusaha sulaman sehingga masih minimnya pengetahuan seputar akses perbankan, (d) kebutuhan pengusaha UMKM sulaman yang tidak semata modal, namun pelatihan dan pendampingan usaha, dan (e) kurangnya koordinasi dari gabungan pengusaha UMKM kerajinan sulaman/sulaman yang terdapat di desa yang berada di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

Identifikasi faktor eksternal, peluang yang ada adalah terbukanya bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari institusi atau lembaga keuangan yang ingin membantu pada bidang permodalan dan pembinaan UMKM kerajinan sulaman/sulaman, seperti bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI, PT Telkom, PT Semen, Jasa Raharja, BRI, dan Bank Indonesia. Sedangkan ancaman (*treats*) yang dihadapi berupa keengganan masyarakat mengakses lembaga keuangan, yang disebabkan karena penetapan bunga tidak sesuai dengan kondisi pengusaha sulaman.

Tabel 5.3 Analisis Matriks SWOT Penerapan Inklusi Keuangan

Faktor Internal Faktor Eksternal	<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
<i>Opportunities (O)</i>	Strategi S-O: membuka akses permodalan baik dari lembaga keuangan bank dan nonbank, pemerintah atau swasta, kemudahan akses dan pembayaran, ketersediaan beragam produk perbankan, dan peningkatan keterampilan SDM dalam <i>financial technology (fintech)</i>	Strategi W-O: mencari mitra kerja yang siap dan menghendaki kerja sama untuk bidang modal, peningkatan pelatihan dan pembinaan produksi dan pemasaran. Melakukan edukasi khususnya tentang akses permodalan kepada perbankan dan instansi pemerintah atau swasta
<i>Threats (T)</i>	Strategi S-T: memberikan pemahaman tentang pentingnya lembaga keuangan khususnya dalam menunjang kegiatan usaha di bidang sistem pembayaran. Menarik dan bekerja sama lembaga yang bersedia memberi pinjaman modal dengan bunga lunak	Strategi W-T: meningkatkan peran pemerintah desa/ kelurahan di Kecamatan Pariaman Utara dalam membuka hubungan kerja sama, baik ke lembaga perbankan maupun instansi lain untuk mengembangkan produk kerajinan sulaman

F. Nilai Faktor Internal-Eksternal (IE)

Berdasarkan Tabel 5.1 dan 5.2 dapat ditentukan skor nilai strategi *Strengths Opportunities (SO)*, *Strengths Threats (ST)*, *Weaknesses Opportunities (WO)*, dan *Weaknesses Threats (WT)* sebagai berikut.

Tabel 5.4 Nilai Strategi SWOT

<i>Strengths (S)</i>	Strategi (SO) : = 1,723 + 1,694 = 3,417	Strategi (ST) : = 1,723 + 1,153 = 2,876
<i>Weaknesses (W)</i>	Strategi (WO) : = 1,304 + 1,694 = 2,998	Strategi (WT) : = 1,304 + 1,153 = 2,457

Sumber: Hasil Penelitian (2019)

Dalam Tabel 5.4 menunjukkan skor nilai terbesar pada strategi *Strengths Opportunities* (SO) sebesar 3,417, strategi *Strengths Threats* (ST) sebesar 2,876, strategi *Weaknesses Opportunities* (WO) sebesar 2,998 dan strategi *Weaknesses Threats* (WT) sebesar 2.457. Selanjutnya, penjelasan strategi yang harus dilakukan dapat dilihat dari matrik analisis internal-eksternal sebagai berikut.

G. Analisis Internal-Eksternal (IE) Matriks

Analisis pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa untuk faktor kekuatan nilai skornya sebesar 1,723 dan faktor kelemahan nilai skornya 1,304. Sedangkan faktor peluang pada Tabel 5.2 nilai skornya 1,694 dan faktor ancaman 1,153. Dari hasil perhitungan hasil penjumlahan dalam Tabel 5.1 menunjukkan, faktor internal mempunyai total skor 3,027 dan pada Tabel 5.2 menunjukkan, faktor eksternal dengan jumlah nilai skor 2,847. Selanjutnya, matriks IE digunakan untuk mengetahui bagaimana posisi inklusi keuangan pada UMKM kerajinan sulaman di daerah perdesaan Kota Pariaman. Alat yang digunakan pada tahapan ini berupa penggunaan matriks IE (Internal-Eksternal) dan analisis SWOT. Berikut ini merupakan matriks IE berdasarkan pengelompokan faktor internal dan eksternal yang ditunjukkan dalam Tabel 5.5 matriks Internal-Eksternal (IE) sebagai berikut.

Tabel 5.5 Matriks Internal-Eksternal

IFAS \ EFAS	Kuat 4,00–3,00	Sedang 2,99–2,00	Lemah 1,99–1,00
Tinggi 4,00–3,00	I	II	III
Sedang 2,99–2,00	IV Internal = 3,027 Eksternal = 2,847	V	VI
Rendah 1,99–1,00	VII	VIII	IX

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Hasil analisis SWOT menunjukkan pada Tabel 5.5 menunjukkan posisi inklusi keuangan pada UMKM kerajinan sulaman benang emas

di Desa Naras I, Naras Hilir, Manggung, dan Balai Naras berada pada kuadran IV. Hal ini menunjukkan kondisi inklusi keuangan pada UMKM kerajinan sulaman secara internal mempunyai kekuatan yang cukup baik dan secara eksternal pada posisi sedang. Posisi kuadran IV ini juga menunjukkan kondisi inklusi keuangan pada UMKM kerajinan sulaman emas di Desa Naras I, Naras Hilir, Manggung, dan Balai Naras berada pada posisi tumbuh dan membangun (*grow and built*).

Dalam masa pertumbuhan dan membangun maka diperlukan strategi yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang. Dalam Tabel 5.4 menunjukkan nilai 3,417 maka strategi yang tepat yaitu *Strengths Opportunities* (SO).

Posisi *Strengths Opportunities* (SO) menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan pada UMKM sulaman berada dalam kondisi tumbuh dan berkembang, sehingga strategi yang tepat adalah penetrasi pasar, seperti penyederhanaan regulasi yang menguntungkan semua pihak dan pengembangan produk, seperti pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha sulaman di perdesaan. Untuk mengembangkan model keuangan inklusif membutuhkan dua tahap. Tahap pertama adalah membangun kepercayaan, dan tahap kedua adalah kepastian dan keberlanjutan.

Untuk membangun kepercayaan pada lembaga keuangan diperlukan adanya lembaga keuangan bank dan nonbank di perdesaan yang proaktif dalam melayani nasabah dengan prosedur yang mudah dan mampu mendidik para pengusaha sulaman perdesaan. Selanjutnya dari sisi pemerintah diperlukan adanya program peningkatan inklusi keuangan, pemberian bantuan keuangan, pembinaan dan pendampingan, serta mengikuti pameran. Selanjutnya dari perspektif pengusaha sulaman di perdesaan, perlu dilakukan peningkatan literasi keuangan, peningkatan kepercayaan diri, perubahan pola pikir dan keyakinan bahwa bank mampu melayani semua masyarakat dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, dan berurusan dengan bank itu penting.

Untuk membangun kepercayaan pada lembaga keuangan diperlukan adanya lembaga keuangan bank dan nonbank di perdesaan yang proaktif dalam melayani nasabah dengan prosedur yang mudah dan mampu mendidik para pengusaha sulaman perdesaan. Selanjutnya dari sisi pemerintah diperlukan adanya program peningkatan inklusi keuangan,

pemberian bantuan keuangan, pembinaan dan pendampingan, serta mengikuti pameran. Selanjutnya dari perspektif pengusaha sulaman di perdesaan, perlu dilakukan peningkatan literasi keuangan, peningkatan kepercayaan diri, perubahan pola pikir dan keyakinan bahwa bank mampu melayani semua masyarakat dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, dan berurusan dengan bank itu penting.

Perkembangan keuangan inklusif membutuhkan kepastian regulasi dan jasa keuangan yang berkelanjutan. Untuk itu perlu dibangun kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak yaitu lembaga keuangan formal dan nonformal, instansi pemerintah, dan pengusaha sulaman di perdesaan terkait tiga indikator yaitu dana, infrastruktur, dan data.

Lembaga keuangan diharapkan mampu memberikan program-program seperti pinjaman dengan suku bunga rendah dan fleksibel secara berkelanjutan, program pembangunan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kelas wirausaha, menyediakan program teknologi keuangan berkelanjutan, dan mampu menjalin kemitraan dengan pengusaha sulaman di daerah perdesaan. Untuk kepastian dan keberlanjutan keuangan inklusif pengusaha di perdesaan, beberapa program yang dapat dilakukan pemerintah antara lain, penyederhanaan regulasi penyaluran bantuan, memiliki data yang valid mengenai jumlah dan kondisi kerajinan sulaman di perdesaan, penyediaan sarana prasarana, memfasilitasi sistem kluster di mana wirausahawan sulaman yang sudah berkembang dapat berkolaborasi dengan yang belum berkembang (sistem kelompok), memiliki program pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, dan kebijakan untuk meningkatkan kreativitas wirausahawan sulaman di perdesaan. Selanjutnya, untuk keberlanjutan pengembangan keuangan inklusif, pengusaha sulaman harus memiliki kemampuan literasi keuangan dan kemampuan mengelola usaha, memiliki pola pikir bahwa usahanya dapat berkembang, serta memiliki kemampuan teknologi, *e-commerce*, dan pemasaran digital. Berdasarkan hasil wawancara dan *Focus Discussion Group* (FGD) dengan beberapa narasumber tentang kendala pelaksanaan terkait peningkatan keuangan inklusif, maka dikembangkan model inklusi keuangan.

H. Model Inklusi Keuangan

Berdasarkan analisis deskriptif, analisis SWOT dan hasil wawancara dan FGD, maka dirancang model inklusi keuangan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses bagi UMKM. Model inklusi keuangan yang dapat dikembangkan bagi UMKM kerajinan sulaman di perdesaan terdiri dari dua tahap. *Tahap pertama*, adalah membangun kepercayaan dan keyakinan dalam mengakses lembaga keuangan. *Tahap selanjutnya*, adalah membangun kepastian dan keberlanjutan dalam mengakses lembaga keuangan. Tahap ini dapat dikembangkan dengan menggunakan konsep *Quadruple Helix*. Konsep ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pasar, dan komunitas masyarakat atau forum UMKM kerajinan dalam penyediaan dana, infrastruktur, dan penyediaan data. Jadi harus ada koordinasi dari empat komponen ini sehingga tercipta inovasi model dalam penerapan inklusi keuangan bagi UMKM kerajinan di perdesaan.

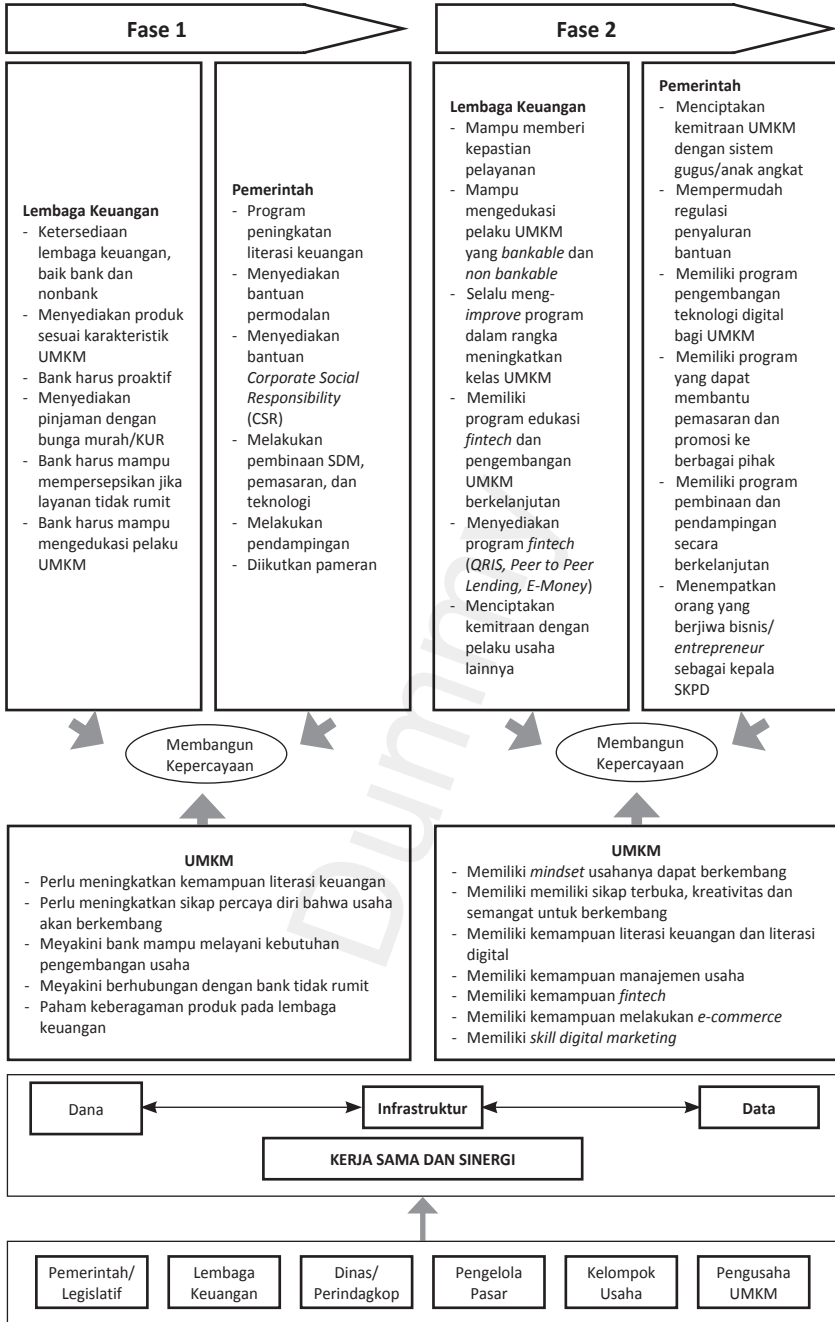
Tahap Pertama: Membangun Kepercayaan dan Keyakinan

Dalam membangun kepercayaan dan keyakinan dalam mengakses lembaga keuangan diperlukan lembaga keuangan bank dan nonbank di perdesaan yang proaktif melayani nasabah dengan prosedur yang jelas dan memberikan informasi yang sesuai kepada pelanggan serta mampu mengedukasi pelaku usaha kerajinan sulaman di perdesaan. Selain itu, mereka harus menginformasikan kepada pelanggan bahwa produknya mudah diakses dan menyediakan produk yang sesuai dengan karakteristik UMKM kerajinan sulaman. Lembaga keuangan juga perlu meningkatkan pengetahuan keuangan mereka, serta meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan bahwa bisnis akan berkembang dengan akses ke lembaga keuangan. Selanjutnya pemerintah perlu membuat beberapa strategi dan kebijakan, seperti membuat program terkait peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan yang dapat mengubah pola pikir, dalam upaya meningkatkan motivasi, kepercayaan, semangat dan keterampilan komunikasi para pengusaha sulaman di perdesaan. Program peningkatan literasi keuangan diperlukan karena akan mendorong meluasnya penggunaan produk dan jasa keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat (OECD, 2013; OJK, 2016; Bhushan, 2014).

Tahap Kedua: Membangun Kepastian dan Keberlanjutan

Dalam membangun kepastian dan keberlanjutan dalam mengakses lembaga keuangan diperlukan kerja sama antara lembaga pemerintah melalui Perindagkop, dan dinas perindustrian, lembaga keuangan bank maupun nonbank, pengelola pasar, dan forum UMKM. Untuk membangun kepastian dan keberlanjutan pelaku UMKM sulaman dalam mengakses lembaga keuangan, diharapkan lembaga keuangan dapat memberikan program-program seperti pinjaman dengan suku bunga rendah dan fleksibel secara berkelanjutan, program pelatihan teknologi keuangan dan pendampingan berkelanjutan.

Untuk menjamin terwujudnya kepastian dan keberlanjutan inklusi keuangan bagi pengusaha di perdesaan, beberapa program yang dapat dihasilkan pemerintah antara lain penyederhanaan regulasi penyaluran bantuan, memiliki data yang valid yang terkait dengan dana, infrastruktur dan data profil keuangan UMKM kerajinan sulaman di perdesaan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama antara berbagai pihak yaitu lembaga keuangan formal dan nonformal, lembaga pemerintah dan pengusaha sulaman di perdesaan, terkait dengan tiga indikator yaitu dana, infrastruktur dan data terkait dengan profil keuangan UMKM kerajinan sulaman di perdesaan. Model inklusi keuangan bagi UMKM sulaman di perdesaan dapat digambarkan sebagaimana Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Model Inklusi Keuangan pada UMKM Kerajinan Sulaman di Perdesaan di Sumatera Barat

6

PENUTUP

A. Rekomendasi

1. Inklusi keuangan merupakan bagian penting dalam proses inklusi sosial ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antarindividu atau antardaerah.
2. Berdasarkan analisis SWOT, dapat disimpulkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman penerapan inklusi keuangan berdasarkan hasil analisis *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS), dan *External Factor Analysis Summary* (EFAS).
3. Hasil analisis dengan Internal-Eksternal (IE) matriks menunjukkan posisi tingkat inklusi keuangan pada kuadran IV dengan nilai 3,417, yang menunjukkan lingkungan internal pada posisi kuat sedangkan lingkungan eksternal pada posisi sedang. Posisi ini mengindikasikan bahwa tingkat inklusi keuangan UMKM kerajinan sulaman dalam kondisi tumbuh dan membangun (*grow and built*).
4. Strategi yang bisa diterapkan adalah strategi *Strength Opportunity* (SO) dengan memaksimalkan kekuatan pasar dan memperhatikan peluang pasar. Strategi ini perlu ditunjang dengan adanya lembaga

keuangan, baik bank maupun nonbank yang memberikan bantuan permodalan yang disesuaikan dengan kapasitas dan pendapatan yang akan mereka terima nantinya.

5. Penyediaan kredit mikro bagi UMKM dengan biaya bunga yang rendah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan selanjutnya dilakukan pelatihan dan pendampingan dari lembaga keuangan yang dilakukan secara intensif. Pendampingan secara intensif tidak hanya dalam bidang keuangan, tetapi juga dalam bidang pemasaran dan upaya diikutsertakan pada acara pameran.
6. Berdasarkan strategi SWOT dan hasil wawancara dengan pihak penyedia (*supply side*) bahwa diperlukan adanya kerja sama dan sinergi dengan mitra yang bersedia memberikan bantuan akses permodalan dan pemasaran. Selain itu pemerintah desa/kelurahan di Kecamatan Pariaman Utara dituntut lebih aktif dalam menjalin *networking* dengan mitra, baik lembaga pemerintahan maupun swasta. Diharapkan dengan adanya edukasi atau upaya pemahaman tentang produk lembaga keuangan untuk menunjang usaha. Edukasi ini juga memuat tentang bagaimana menangkap peluang dan kesempatan yang terbuka dari lembaga keuangan maupun bukan lembaga keuangan.

B. Implikasi

Implikasi bagi model inklusi keuangan yang efektif:

1. Program inklusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dari pengusaha kerajinan sulaman pada lembaga keuangan mikro.
2. Meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM kerajinan sulaman terutama dari sisi permintaan akan layanan keuangan, seperti: (1) akses kepada produk dan lembaga keuangan dan (2) akses kepada penyedia dan instrumen jasa pembayaran seperti uang elektronik.
3. Upaya tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk inovasi produk keuangan dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi, pengembangan infrastruktur di sektor keuangan, serta harmonisasi dan penguatan kebijakan di sektor keuangan.

4. Peningkatan ketersediaan dana, kualitas data dan informasi, sarana dan prasarana dapat difokuskan melalui peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi melalui konsep *Quadruple Helix* antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, pengelola pasar/swasta serta masyarakat sebagai pelaku usaha.

Dummy

Dummy



DAFTAR PUSTAKA

- Aderianti, S. (2018). “Mengenai Inklusi Keuangan: Pengertian, Manfaat, dan Inovasinya untuk Negara”. Cekaja.com.
- Alamsyah, H. (2014). “Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah”. Seminar Nasional Keuangan Inklusif, Surabaya.
- Alliance for Financial Inclusion. (2010). “Financial Inclusion Measurement for Regulators: Survey Design and Implementation”. 1–22.
- Ansong, A. & M.A. Gyensare. (2012). “Determinants of University Working-Students’ Financial Literacy at the University of Cape Coast, Ghana”. *International Journal of Business and Management*, (7) 9: 126-133.
- Aribawa, D. (2016). “Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah”. *Siasat Bisnis*, 1-13.
- Arsana, I. G. (2018). *NFIS Development Process*. Washington: World Bank Group.
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMK.

- Chen, H. & R.P. Volpe. (1998). "An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students". *Financial Service Review*, 7(2), 107-128.
- Dahmen, P. (2014). "Financial Literacy and the Success of Small Businesses: An Observation from a Small Business Development Center". *Numeracy, Advancing Education in Quantitative Literacy*, 7(1).
- Fatoki, O. (2014). "The Financial Literacy of Micro Entrepreneurs in South Africa". *Journal of Social Science*, 151-158.
- Garman, E.T. & R.E. Forgue. (2010). *Personal Finance*. Singapore: South-Western Cengage Learning.
- Global Financial Report. (2014). "Financial Inclusion". <http://hdl.handle.net/10986/16238>: The World Bank.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hung, A., A. Parker, & J. Yoong. (2009). "Defining and Measuring Financial". *RAND Working Papers*.
- Jariwala, H. & M. Sharma. (2011). "Financial Literacy: A Call for an Attention". *Conference on Inclusive & Sustainable Growth Role of Industry. Government and Society Conference Proceedings*.
- Keown & L. Anne. (2011). "The Financial Knowledge of Canadians". *Canadian Social Trends*(91).
- Khaki, A.R. & M.-u.-D. Sangmi. (2012). "Financial Inclusion in Jammu & Kashmir: A Study on Banker's Initiatives". *Journal of Arts, Science & Commerce*, 115-123.
- Kimmit, J. & Munoz. (2017). "Entrepreneurship and Financial Inclusion through the Lens of Instrumental Freedoms". *International Small Business Journal*.
- Kiyosaki, R.T. (2003). "Financial Literacy-How The Rich Get Rich".
- Lusardi, A. (2012). "Numeracy, Financial Literacy, and Financial Decision Making". *NBER Working Paper No. 17821*.
- Lusardi, A., O.S. Mitchell, & V. Curto. (2010). "Financial Literacy among the Young". *Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 358-380. DOI: 10.1111/j.1745-6606.2010.01173.x

- Manurung, J. & A. Manurung. (2009). *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martowardjojo, A. (2016). "UMKM Dibayangi Kemunduran Tanpa Literasi Keuangan". *ANTARA News*.
- Mahdzan, N.S. & S. Tabiani. (2013). "The Impact of Financial Literacy on Individual Saving: An Exploratory Study in the Malaysia Context". *Transformations in Business & Economics*, Vol. 12, No. 1 (28), pp. 41-55.
- Mandell, Lewis. (2008). *The Financial Literacy of Young American Adults: Results of the 2008 National Jump\$Tart Coalition Survey of High School Seniors and College Student*. Washington, DC: The Jump\$Tart Coalition for Personal Financial Literacy.
- Muraga, K.P. & N. John. (2015). "Effects of Financial Literacy on Performance of Youth Led Entreprises: A Case of Equity Group Foundation Training Program in Kiambu County". *International Journal of Social Sciences Management and Entrepreneurship*, 218-231.
- Nababan, D. dan I. Sadalia. (2013). "Analisis Personal Financial Literacy dan Financial Behavior Mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara". *Repository Jurnal Universitas Sumatera Utara*. 1(1), 1-16. <http://202.0.107.5/index.php/jmim/article/view/651/pd>.
- Nidar, S.R. & S. Bestari. (2012). "Personal Financial Literacy among University Students". *World Journal of Social Sciences*, 162-171.
- OECD. (2016). *Education at a Glance Indicators*. Organization for Economic Cooperation and Development.
- OJK. (2016). *Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
- Oseifuah, E. (2010). "Financial Literacy and Youth Entrepreneurship in South Africa". *African Journal of Economy and Management Studies*, 1(2), 164-182.
- Puspitaningtyas, Z. (2017). "Manfaat Literasi Keuangan bagi Business Sustainability". *Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis VII* (hlm. 254-262). Universitas Tarumanagara, Yogyakarta.
- Rakhmindyarto & Syaifullah. (2013). "Bunga Rampai Pemikiran Ekonomi Hijau&Keuangan Inklusif". <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/42978>.

- Rosyeni, R. (2016). "Aspek Bias dalam Pengambilan Keputusan Pendanaan dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Usaha Kerajinan Sulaman di Kota Padang". Lembaga Penelitian UNP, Padang.
- Sachindra. (2013). "Need for Financial Inclusion and Challenges Ahead- An Indian Perspective". *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 9(5), 33-36.
- Sanjaya, I.M. (2014). "Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inkusif sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". *Tesis*, Institut Pertanian Bogor.
- Sarma, M. & J. Pais. (2011). "Financial Inclusion and Development". *Journal of International Development*, 613-628.
- Sevim, N., F. Temizel, & Ö. Sayilir. (2012). "The Effects of Financial Literacy on the Borrowing Behavior of Turkish Financial Consumers". *International Journal of Consumer Studies*, 36, 573-579.
- Shankar, S. (2013). "Financial Inclusion in India: Do Microfinance Institutions Address Access Barriers?". *ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives*, 2(1), 60-74.
- Thomas, B. & P. Subhashree. (2020). "Factors that Influence the Financial Literacy among Engineering Students". *Procedia Computer Science*, 480-487.
- Wise, S. (2013). "The Impact of Financial Literacy on New Venture Survival". *International Journal of Business and Management*, 8(23).
- Worthington, Andrew C. (2006). "Predicting Financial Literacy in Australia". *Financial Services Review*, 15(1), 59-7.
- World Bank. (2014). "Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion". Washington, DC.
- Xu, L. & B. Zia. (2012). "Financial Literacy around the World: An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the Way Forward". <http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-6107>.



GLOSARIUM

Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT): analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan inklusi keuangan.

Daya Saing: kemampuan UMKM dalam menghadapi persaingan pasar.

Demand Barriers: kendala dari sisi permintaan.

E-commerce: pembelian atau penjualan barang secara elektronik.

Informan: orang yang dapat memberikan informasi.

Inklusi Keuangan: kondisi di mana setiap individu memiliki kemudahan akses ke berbagai layanan keuangan formal.

Keberlangsungan Usaha: kondisi di mana pelaku usaha mampu mempertahankan operasional usahanya dan mampu meningkatkan pendapatan usaha secara terus-menerus.

Lembaga Keuangan Mikro: lembaga keuangan yang memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Lingkungan Internal: semua sumber daya perusahaan yang meliputi semua manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan (*corporate culture*).

Lingkungan Eksternal: lingkungan yang berada di luar perusahaan yang dapat memengaruhi perusahaan (UMKM).

Literasi Keuangan: kemampuan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta keyakinan pelaku usaha maupun masyarakat dalam mengelola dan mengambil keputusan keuangan dengan baik.

Permodalan: unsur utama dalam pengembangan usaha.

Posisi Tumbuh dan Membangun (*Grow and Built*): strategi pengembangan suatu model dengan melakukan penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk.

Proaktif: sikap di mana seseorang mampu menentukan pilihan dan meresponsnya secara positif.

Quadruple Helix: konsep kerja sama antara empat unsur yaitu antara pemerintah, lembaga keuangan, pasar, dan komunitas masyarakat (forum UMKM).

Sinergi: suatu proses atau interaksi yang dapat memberikan suatu hasil yang optimum.

Social Benefit: kontribusi positif atau manfaat kepada masyarakat.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI): strategi yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan.

Supply Barriers: kendala dari sisi penawaran.

Transaksi Digital: bentuk pembayaran secara virtual yang menggunakan perangkat dalam bentuk aplikasi ataupun *website*.

UMKM: usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha.

Wirausaha: pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki dan berani mengambil risiko dari peluang bisnis yang ada.



INDEKS

A

Analisis, v, viii, ix, 5, 33, 41, 43-44, 48, 53, 55-56, 62, 64-67, 70, 73, 79, 81

D

Data, vi, viii, ix, 41-44, 51-53, 57, 61, 69-71, 74-75

H

Hasil, v, 2-3, 5, 38, 41, 43, 51-53, 57, 62-63, 65-67, 69-70, 73-74, 82

I

Indikator, ix, 15, 22, 26-30, 61, 69, 71

Informan, 44, 57-58, 60-61, 81

Inklusi, v, vi, vii, viii, ix, xi, iv, 2, 4-7, 23-28, 31, 33-34, 37-39, 41-44, 50, 52-55, 57-74, 77, 80-82

K

Kerajinan, v, vi, viii, ix, xi, iv, 1-7, 41-44, 47-52, 54-55, 57-65, 67-74, 80

L

Literasi, v, vii, viii, ix, xi, iv, 3, 5-6, 9-15, 17-23, 38, 41-43, 51-54, 68-70, 74, 77, 79, 82

M

Masalah, vii, 2-3, 5, 7, 10, 20-21, 25, 33, 56, 58-60

Metode, vii, 41-42, 44, 78

Model, v, vi, viii, xi, iv, 4-7, 43, 53,
55, 62, 68-72, 74, 82

P

Penelitian, v, vi, vii, viii, ix, 3-7,
20, 39, 41-42, 47-49, 51-53,
66-67, 80-81

Perdesaan, v, vi, ix, xi, iv, 4-6, 28,
31, 36-37, 44, 57-61, 63-64,
67-72

Prosedur, vii, 3, 42, 53, 58, 68-70

T

Tahap, v, vi, 43-44, 55, 68, 70-71

Tujuan, vii, 6, 11-12, 16-18, 23-25,
34, 41-42, 51, 54

U

UMKM, v, vi, viii, ix, xi, iv, 1-7,
12, 32, 34, 38, 41-44, 50-52,
54-65, 67-68, 70-74, 77, 79,
81-82

Upaya, 1-2, 4-5, 14, 23, 34, 70, 74

V

Variabel, viii, ix, 44-45, 51-53



BIODATA PENULIS



Rosyeni Rasyid, Dosen Jurusan Manajemen di Universitas Negeri Padang, Indonesia. Lahir di Padang, 14 Februari 1961. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan tahun 1986 di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, melanjutkan Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta dengan konsentrasi Manajemen Keuangan, lulus tahun 1997. Melanjutkan Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Andalas dengan konsentrasi Manajemen Keuangan, lulus tahun 2019.



Erni Masdupi, *Associate Professor in Financial Management at Management Department of Universitas Negeri Padang*. Lahir pada tanggal 24 April 1974 di Payakumbuh. Menyelesaikan studi dan memperoleh gelar S.E. dalam bidang Manajemen Keuangan di Universitas Andalas pada tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar M.Si. dalam bidang Manajemen

Keuangan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2002. Selanjutnya mendapatkan gelar Ph.D. dalam bidang Manajemen Keuangan (*Corporate Finance*) di Universitas Utara Malaysia pada tahun 2010. Di samping itu, juga memiliki gelar CFP (*Certified Financial Planner*), sertifikat kompetensi bertaraf internasional dari MM UGM-FPSB Jakarta.



Muthia Roza Linda, Dosen Jurusan Manajemen di Universitas Negeri Padang, Indonesia. Lahir di Padang pada tanggal 25 Maret 1980. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada tahun 2002 di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Melanjutkan Program Magister Manajemen, lulus pada tahun 2008 di Program Magister Manajemen Universitas Andalas. Dan saat ini, sejak tahun 2021 sedang dalam pendidikan pada Program Doktorat Ilmu Manajemen Universitas Andalas.